

**DARI**  
**insun medal**  
**insun madangan**  
**TERWUJUD TRANSFORMASI DIGITAL**  
**YANG DITERANGKAN**



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional





**DARI**

**INSUN MEDAL  
INSUN MADANGAN**

**TERWUJUD TRANSFORMASI DIGITAL  
YANG DITERANGKAN**

## **DARI INSUN MEDAL INSUN MADANGAN TERWUJUD TRANSFORMASI DIGITAL YANG DITERANGKAN**

Copyright 2022, Dewan TIK Nasional

Editorial Team : Teddy Iswahyudi, Inggrit Diah Aprillia, Kanaya Tabitha, Irwansyah Nuzar, Desy Septiyani

Cover Design & Layout : Ardi Pradana

Contributor : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, Direktorat Ketenagalistrikan Telekomunikasi dan Informatika, Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Muhammad Andy Zaky, Hari Sungkari, Ashwin Sasongko Sastrosubroto, Garuda Sugardo, Andianto Haryoko, Rizki Sammyho Putera, Gerry Firmansyah, Farisya Setiadi, dan Nurcholis Ramlan.

*All rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed or electronic form without permission. Please do not participate in encourage piracy of copyright materials in violation of the author's right. Purchase only authorized editions.*

*Vi+100pages, ; 18,5 x 27 cm*

*ISBN : .....*



# DAFTAR ISI

v	<b>DAFTAR ISI</b>		
vi	<b>DAFTAR GAMBAR</b>		
vii	<b>KATA PENGANTAR</b>		
viii	<b>SAMBUTAN KETUA TIM PELAKSANA</b>		
ix	<b>SAMBUTAN BUPATI SUMEDANG</b>		
xi	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>		
<b>1</b>	<b>1. Transformasi Digital Untuk Kesejahteraan Masyarakat</b>		
3	Peta Administratif	27	Transformasi Menuju <i>Smart City</i>
4	Demografi dan Topografi	29	Landasan Hukum Transformasi Digital Indonesia
4	Menuju Masyarakat SIMPATI	<b>30</b>	<b>3. Langkah Transformasi Digital Kabupaten Sumedang</b>
<b>7</b>	<b>2. Transformasi Digital</b>	31	Tahapan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang
9	<i>Framework</i> Transformasi Digital	38	<i>Milestone</i> Sumedang <i>Happy Digital Region</i>
9	<i>Strategic Goal</i>	39	<i>Smart City</i> Sumedang
11	<i>Strategic Objectives</i>	<b>41</b>	<b>4. Dampak Transformasi Digital Kabupaten Sumedang</b>
13	<i>Strategic Process</i>	42	Kinerja di Lingkungan ASN
14	<i>Strategic Thrust</i>	43	Kebijakan Pemerintah Masyarakat
18	<i>Strategic Foundations</i>	43	Prestasi Kabupaten Sumedang 2021
27	Proses Transformasi Digital	44	
		<b>71</b>	<b>5. Penutup</b>
		<b>74</b>	<b>Lampiran</b>

# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Wilayah Kabupaten Sumedang
- Gambar 2. Demografi dan Topografi Kabupaten Sumedang
- Gambar 3. *Framework* Transformasi Digital
- Gambar 4. *Strategic Objectives*
- Gambar 5. Tahapan Transformasi
- Gambar 6. Kerangka Pikir *Smart City*
- Gambar 7. Dimensi *Smart City*

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, perlindungan, serta motivasi dan karunia-Nya sehingga dapat tersusunnya buku hasil kolaborasi Wantiknas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang).

Penyusunan buku ini dilakukan dalam rangka menyusun inisiatif terkait implementasi transformasi digital di Kabupaten Sumedang sebagai tindaklanjut dari arahan Bapak Presiden tentang Lima (5) Langkah Percepatan Transformasi Digital. Kajian ini telah disusun secara maksimal dan dengan bantuan berbagai pihak sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Dengan terbatasnya waktu, pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam kajian ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca dalam penyempurnaan kajian ini. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan kajian Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.

# SAMBUTAN KETUA TIM PELAKSANA

Indonesia berada pada fase transformasi digital hal ini terlihat dari masifnya pengguna internet, media sosial, hingga digitalisasi di berbagai sektor. Keberadaan infrastruktur sebagai tulang punggung dan pemerataan akses broadband juga sudah tersedia. Namun bagaimana dengan transformasi digital di daerah?

Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan transformasi digital, Dewan TIK Nasional (Wantiknas) memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan transformasi digital di Indonesia termasuk di daerah. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana agar kita bisa menyediakan kebutuhan digital dan menyebarkannya ke seluruh daerah di Indonesia. Transformasi digital bukan hanya perhatian dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Beberapa daerah sudah mengawali langkah transformasi digital sejak beberapa tahun silam walau saat dicanangkan belum disebut sebagai transformasi digital.



Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sejak awal telah didampingi oleh Wantiknas dengan hasil yang membanggakan. Keberhasilan Kabupaten Sumedang adalah mempersiapkan kebutuhan SDM digital melalui kolaborasi dengan *stakeholder*, pemanfaatan digital untuk peningkatan ekonomi masyarakat, penurunan *stunting*, dan juga pelayanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Prestasi ini juga mengantarkan Kabupaten Sumedang menjadi percontohan nasional untuk daerah lainnya. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanah pada pengembangan transformasi digital, Wantiknas tentunya memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan transformasi digital di Indonesia termasuk daerah lain. Kita siap berkolaborasi dengan semuanya untuk mencari formula terbaik, demi kebaikan bangsa. Dengan harapan kemajuan bangsa ini merata hingga ke setiap pelosok wilayah negeri ini, Wantiknas terus siap mendampingi semua pemerintahan daerah dari Sabang sampai Merauke.

Jabat Erat

**Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.**  
**KETUA TIM PELAKSANA WANTIKNAS**

# SAMBUTAN BUPATI SUMEDANG

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sampurasun,

Misi keempat Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018 - 2023 ialah menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat yang dipertajam pada tujuan kedua yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran kedua, yakni tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh Teknologi Informasi.

Oleh karena itu, dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memanfaatkan digitalisasi dengan skema memanfaatkan data berupa angka-angka dan fakta-fakta yang tersedia kemudian data tersebut diolah dan diberi makna menjadi sebuah informasi. Informasi dihubungkan dengan berbagai teori sehingga melahirkan sebuah *knowledge*. *Knowledge* dilengkapi dengan berbagai pengalaman yang terjadi akan menghasilkan sebuah *insight* dan dengan *insight* yang representatif sebuah kebijakan atau keputusan diambil yang ujungnya sebuah keputusan menjadi logis dan difahami.

Kondisi ini bisa terjadi karena Sumedang telah melakukan transformasi digital secara sistematis dengan dimulai dari internalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh level Pemerintahan dari mulai Tingkat Kabupaten sampai ke Tingkat Desa. Tahap berikutnya adalah melakukan Sumedang *Connected* dengan membangun jaringan internet sampai ke 270 desa. Selanjutnya dilakukan kolaborasi dan integrasi berbagai aplikasi yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga mempermudah implementasi *data driven government* dan saat ini sedang dikembangkan strategi penerapan *Artificial Intelligence* baik dengan sasaran personal ataupun institusional.

Pandemi Covid-19 yang bagi kebanyakan Pemerintah Daerah menjadi suatu hambatan, di Kabupaten Sumedang diubah menjadi suatu tantangan untuk menjadi *the first, the better* dan *the different* sehingga berbagai lompatan dan terobosan-terobosan dilakukan di masa pandemi tersebut untuk terus memperbaiki administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan melakukan transformasi digital.



Raihan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sumedang di Tahun 2022 yakni 3,84 membuktikan Kabupaten Sumedang telah menjadi *Digital Mastery* dimana terjadi keseimbangan antara *Digital Capability* dengan *Digital Leadership*. Sebagai sebuah upaya untuk memperkuat *Digital Mastery* saat ini sedang diinisiasi sebuah kebijakan transformasi digital dengan produk sebuah Perda Sumedang tentang Transformasi Digital. Sementara dilain fihak saat ini Kabupaten Sumedang telah menyusun master plan Smart City Kabupaten Sumedang dan master plan Transformasi Digital Menuju Sumedang *Happy Digital Region* serta telah mempunyai arsitektur SPBE.

Penerapan SPBE di Kab. Sumedang telah berhasil mendorong dan melahirkan banyak prestasi baik di tingkat regional ataupun nasional seperti Juara 1 Satu Data Jabar Award untuk Tingkat Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Informatif Tahun 2022, Kabupaten Terbaik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR pada tahun 2022, Juara 1 Tinarbuka Tingkat Nasional pada tahun 2023, aplikasi *stunting* telah direplikasi dan dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk diterapkan diseluruh Indonesia dan aplikasi *e-office* Sumedang telah banyak direplikasi oleh Pemerintah Daerah lain se-Indonesia.

Alhamdulillah, kini telah hadir kajian rekomendasi Tranformasi Digital Kabupaten Sumedang, kolaborasi Wantiknas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu rujukan dan pedoman yang akan sangat berguna sebagai media pemantik gagasan dan inovasi bagi pelaku dan mitra dalam upaya mengimplementasikan transformasi digital di Kabupaten Sumedang sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI tentang 5 Langkah Percepatan Transformasi Digital.

Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas terbitnya kajian rekomendasi ini, yang tentunya diharapkan turut memotivasi jajaran pemerintah daerah dalam memanfaatkan SPBE sebagai *tools* untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Sumedang, sehingga pada akhirnya mampu mendukung akselerasi visi Sumedang 2023 yakni, Simpati (Sejahtera masyarakatnya, Agamis akhlaqnya, Maju daerahnya, Profesional aparaturnya, dan Kreatif ekonominya).

Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas peluncuran kajian rekomendasi "Tranformasi Digital Kabupaten Sumedang". Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan meridhai segala ikhtiar kita.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,  
Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Sumedang, Juni 2023

**BUPATI SUMEDANG,  
Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M.**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Teknologi saat ini berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang diakibatkan dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai sektor. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pengembangan transformasi digital di berbagai bidang.

Transformasi digital telah membawa berbagai dampak positif untuk berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan data produk, mengoptimalkan sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi komunikasi antara pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan banyak organisasi maupun kota yang berlomba-lomba dalam mempercepat transformasi digital.

Bapak Presiden sendiri telah menyampaikan arahan mengenai lima (5) langkah percepatan transformasi digital diantaranya Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapkan betul *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. Namun dalam penerapannya di lapangan baik tingkat pusat maupun daerah masih banyak ditemui kendala dan permasalahan dalam mempercepat transformasi digital antara lain masih belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, belum ada payung hukum yang jelas terkait transformasi digital, isu keamanan dan perlindungan privasi, integrasi sistem dan layanan, serta resistensi organisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam rangka melakukan kajian, evaluasi, dan menetapkan langkah - langkah penyelesaian masalah strategis di bidang TIK, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) melakukan kajian Transformasi Digital Kabupaten Sumedang. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah maupun daerah dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital.

# 01 DARI SUMEDANG UNTUK INDONESIA

**A** ikisah tersebutlah seorang Raja bernama Bathara Tungtang Buana dari Kerajaan Tembong Agung yang konon didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih yang merupakan putra dari Aria Bimaraksa dengan Dewi Komalasari. Aria Bimaraksa sendiri adalah cucu dari Wretikandayun yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Sunda Galuh pada 612 Masehi.

Ketika bertahta, Bathara Tungtang Buana mempelajari ilmu kebijaksanaan Bernama Ilmu Kasumedangan di Gunung Mandala Sakti yang berada di sekitar Situraja. Berhasil menguasai ilmu tersebut, raja ini kemudian mengganti namanya menjadi Prabu Tadjimalela, begitupula dengan kerajaannya yang diganti menjadi Sumedang Larang.

Dikutip dari Jurnal Patanjala Vol. 3, No. 1, Maret 2011: 154-168; Sejarah Kerajaan Sumedang Larang oleh Euis Thresnawaty S, suatu saat ketika sang prabu tengah menobatkan putranya yang bernama Gajah Agung sebagai pewaris tahta selanjutnya, mendadak langit dipenuhi cahaya yang terang benderang. Melihat peristiwa itu ia pun mengucapkan sebuah kalimat "*Ingsun medal, ingsun madangan, kaulabijil, kaulanyaangan*" yang bermakna aku terlahir, aku memberi penerangan. Dari sinilah falsafah hidup masyarakat Sumedang berasal.



Falsafah hidup ini diartikan bahwa setiap masyarakat Sumedang harus menjadi bermanfaat bagi orang lain atau bagi masyarakatnya. Harus menjadi pembawa cahaya yang memberikan penerangan bagi orang yang tengah dalam kegelapan.

Ini juga yang dipegang teguh oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang saat menularkan keberhasilannya dalam melakukan transformasi digital di sektor pemerintahan. Bukan tanpa kendala, apa yang diraih oleh Kabupaten Sumedang telah melewati proses panjang dengan berbagai tantangannya. Berawal dari niat memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, hingga akhirnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal transformasi digital.

Secara geografis Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki ibu kota Sumedang Utara ini adalah daerah berbukit dan gunung dengan

**Gambar 1. Wilayah Kabupaten Sumedang**



Sumber: [sumedangkab.go.id](http://sumedangkab.go.id), diolah kembali oleh WANTIKNAS

ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sebagian besar Wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.667 m), berada di Utara Perkotaan Sumedang.

Kabupaten yang terkenal dengan tahu Sumedangnya ini memiliki sejarah yang panjang hingga menjadi kabupaten seperti saat ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, berdasarkan catatan sejarah, di wilayah Sumedang dulunya berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembung Agung yang kemudian diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang pada masa pemerintahan Prabu Tadjimalela. Kerajaan Sumedang Larang ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Pangeran Angka Widjaya atau Prabu Geusan Ulun. Penobatan Prabu Geusan Ulun sebagai pemimpin Sumedang Larang dilakukan oleh Prabu Siliwangi pada tanggal 22 April 1578. Secara sistem pemerintahan, Prabu Geusan Ulun mulai menerapkan sistem pemerintahan kabupaten di Sumedang Larang dari sinilah sejarah Sumedang sebagai kabupaten dimulai.

## Peta Administratif

Menurut catatan sejarah, wilayah kekuasaan Sumedang Larang pada masa Prabu Geusan Ulun ini sangat luas, yaitu mencapai Samudera Hindia di selatan, Laut Jawa di utara. Kekuasaan juga membentang hingga Cisadane di barat, serta Kali Brebes di wilayah timur.



Sumber: [sumedangkab.go.id](http://sumedangkab.go.id)

Pada perkembangannya, Sumedang Larang sempat menjadi negara vasal atau negara bagian Kesultanan Cirebon hingga kemudian Kesultanan Mataram. Saat ini Kabupaten Sumedang sendiri memiliki batas-batas wilayahnya, sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang dan sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.

## VISI

**“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”  
Sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparturnya, dan kreatif ekonominya”**

## Demografi dan Topografi

Berjarak kurang lebih 45 km ke arah Timur Laut dari Kota Bandung, kabupaten yang dianugerahi alam yang indah ini memiliki luas wilayah sekitar 155.871,98 Ha dan terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Sementara untuk Kecamatan yang paling luas wilayahnya di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Buahdua dengan luas wilayah sebesar 107,68 Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua dengan luas 17,71 Km<sup>2</sup>, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, Kabupaten Sumedang memiliki jumlah penduduk berdasarkan angka hasil proyeksi tahun 2021 sebanyak 1.159.346 jiwa yang terdiri atas 585.251 jiwa penduduk laki-laki dan 574.095 jiwa penduduk perempuan.

Adapun untuk jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan di Kabupaten Sumedang berdasarkan persentasenya, Kecamatan Jatinangor menjadi paling banyak penduduknya dengan persentase 8,51 persen dari jumlah penduduk di Sumedang. Sedangkan Kecamatan Surian menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Sumedang dengan persentase 0,99 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sumedang.

## Menuju Masyarakat SIMPATI

Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki Visi Simpati yang menjadi cita-cita besar yang harus diwujudkan melalui langkah transformasi digital. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

Berikut adalah penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

### a. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

### b. Agamis

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**c. Maju**

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**d. Profesional**

*Good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

**e. Kreatif**

Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang 10 dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

## MISI

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;**
- b. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;**
- c. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;**
- d. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;**
- e. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.**

Untuk mewujudkan visi SIMPATI Kabupaten Sumedang pada tahun 2023, maka diterapkan Sumedang *Happy Digital Region*. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2021, definisi Sumedang *Happy Digital Region* yaitu pengelolaan dan pembangunan Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan warganya.

Kelak langkah pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien yang diniatkan untuk kesejahteraan masyarakat ini menjadikan Kabupaten Sumedang benar-benar mewujudkan falsafah "*Insun Medal Insun Madangan*". Bagaimana tidak, keberhasilan Kabupaten Sumedang menjadi inspirasi buat banyak daerah dan mendapat perhatian bukan hanya dari pemerintah pusat melainkan juga dari lembaga internasional.



# 02 TRANSFORMASI DIGITAL

Secara umum transformasi digital adalah proses mengubah cara-cara baru untuk bekerja terus menerus dalam organisasi menggunakan kombinasi dan adopsi teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan layanan atau produk, mengoptimalkan sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan.

Transformasi digital merupakan hal yang mendorong organisasi untuk mengadopsi teknologi baru dalam memberikan nilai yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Transformasi ini juga dapat melampaui saluran tradisional, seperti pemasaran & periklanan, prosedur, budaya, teknologi, dan pengalaman (*experience*) yang secara kolektif menentukan nilai tambah yang menjangkau para pemangku kepentingan dengan tepat pada waktu yang tepat. Dengan demikian, dampak transformasi digital sangat dirasakan oleh berbagai pihak sehingga menjadikan jenis transformasi ini sebagai tren global.

Selama dekade terakhir, sejumlah tren dan inovasi teknologi muncul menjadi terobosan untuk mendukung transformasi digital. Kebanyakan dari terobosan-terobosan tersebut fokus pada analisis data canggih, *Internet of Things (IoT)*, *Cloud*, *Blockchain*, *5G*, dan lainnya. Tren teknologi digital yang terus berkembang ini tidak terhindarkan bagi seluruh Negara di dunia untuk mengejar ketertinggalan.

Pemerintah disetiap negara mengeluarkan investasi yang begitu besar untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam mengubah layanan publik mereka. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan setiap negara untuk terus meningkatkan status transformasi digital mereka dan membangun pertumbuhan berkelanjutan dari negara itu sendiri. Negara-negara yang memanfaatkan transformasi digital memiliki seorang kepala negara yang berperan krusial dalam menyukseskan transformasi dan memastikan penerapan teknologi digital mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga semakin



meningkatkan akselerasi transformasi digital. Selain itu, pada penerapan transformasi digital di dalam organisasi diperlukan peran *Chief Information Officer* (CIO) dalam perencanaan strategis dan *Chief Technical Officer* (CTO) yang memiliki fokus pada pilihan teknologi yang digunakan.

Peran CIO dan CTO telah menjadi salah satu pahlawan dari cara merespon pandemi COVID-19 dengan melakukan *pivot* organisasi dalam bertransformasi untuk memungkinkan kerja jarak jauh yang efektif dan efisien. Parameter keberhasilan transformasi digital telah mengubah banyak aspek bisnis dan bahkan seluruh industri. Salah satu awal mula kemajuan industri yaitu kisah revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap dan elektrifikasi yang merevolusi seluruh sektor ekonomi dari abad ke-18. Teknologi modern mulai berubah secara dramatis sejak saat itu dan masyarakat global mulai berlomba membuat inovasi teknologi yang didorong oleh permasalahan masyarakat. Teknologi harus berakselerasi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Sebagai contoh pada teknologi komputasi yang sudah sering diamati dengan peningkatan kapasitas daya komputasi yang besar. Perkembangan teknologi komputasi sekarang menjadi berkali-kali lipat jumlahnya yang memimpin lompatan masa depan yang menakjubkan dalam kemampuan teknologi.

Lompatan teknologi global dari waktu ke waktu terus berkembang dalam menopang suksesnya transformasi digital. Hal tersebut sejalan dengan hasil laporan *World Economic Forum* dan *Accenture* yang memaparkan proyek transformasi digital fase satu. Pada fase tersebut mengidentifikasi lebih dari 65 inisiatif digital di enam industri dalam pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan nilai yang signifikan bagi masyarakat dan industri.

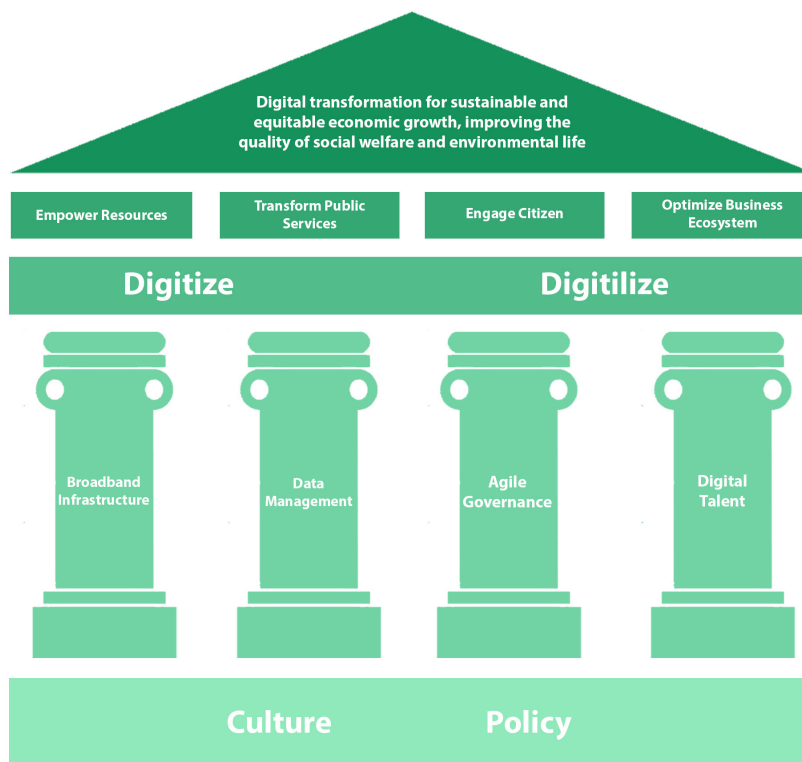
Inisiatif industri digital yang mendukung transformasi digital memiliki tiga kategori, yaitu pertumbuhan melalui digitalisasi, efisiensi dengan digitalisasi, dan pengalaman digital. Kategori pertama, sektor industri yang paling unggul dalam hal ini adalah media. Hal tersebut dipercepat oleh mobilitas masyarakat dalam memperoleh berita secara instan melalui daring (*online*) sehingga memunculkan digitalisasi pada periklanan & konten secara personalisasi, reformasi transparansi & data pribadi, dan konsultasi periklanan.

Kedua, sektor yang paling efisien akibat penerapan digitalisasi adalah logistik, otomotif, dan elektrifikasi. Teknologi dalam industri logistik telah melahirkan pengantaran barang melalui pesawat tanpa awak (*drone*). Selanjutnya, otomotif juga berbenah dengan menggunakan rantai pasok (*supply chain*) yang terkoneksi. Pada sektor elektrifikasi, digitalisasi manajemen performansi aset juga telah membantu beberapa perusahaan untuk selangkah lebih maju dan mendongkrak profitabilitasnya. Dengan demikian, kategori pertumbuhan digitalisasi dan dampak efisiensi akibat digitalisasi telah melahirkan kategori ketiga yaitu pengalaman digital (*digital experience*) seperti yang dialami sektor media dengan konten dan komunikasinya, logistik dengan pengiriman hari yang sama (*same-day delivery*), dan konsumen dengan pengalaman produk hingga pelayanannya. Transformasi digital sangat identik dengan pengalaman digital sebagai upaya transformasi ini saling berkaitan dan membentuk suatu keselarasan seperti yang diimplementasikan oleh beberapa negara di Kawasan Asia, Amerika, Australia, dan Afrika.

## Framework Transformasi Digital

Transformasi Digital Indonesia bertujuan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung proses transformasi digital di Indonesia. Kerangka Kerja Strategis Transformasi Digital Indonesia yang disusun oleh Dewan TIK Nasional memiliki 4 (empat) lapisan, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah berikut ini:

Gambar 3. Framework Transformasi Digital



Sumber: Buku Peta Jalan Transformasi Digital WANTIKNAS, 2020

**“Transformasi digital adalah proses mengubah cara-cara baru untuk bekerja terus menerus dalam organisasi menggunakan kombinasi dan adopsi teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan layanan atau produk, mengoptimalkan sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan.”**

### 1. Strategic Goal

*“Digital Transformation for sustainable and equitable economic growth, improving the quality of social welfare and environmental life.”* (Keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan).



**a. Keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil**

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Namun ke depan, tantangan pertumbuhan ekonomi pun masih dikhawatirkan. Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang 2020–2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun.

Kemudian stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada 2000 menjadi 21,0 persen pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3,0 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar, tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.550 – 5.930 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020–2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar  $3,0 \pm 1$  persen pada tahun 2020–2022, dan  $2,5 \pm 1$  persen pada tahun 2023–2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

**b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan**

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi (RE) yang telah mencapai 98,3 persen pada tahun 2018. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan *smartgrid*, dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

Oleh karena itu, cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas.

Gambar 4. *Strategic Objectives*



Sumber: Buku Peta Jalan Transformasi Digital WANTIKNAS, 2020

## 2. *Strategic Objectives*

Perlunya tujuan strategis untuk tercapainya *strategic goal* dalam pelaksanaan transformasi digital. Adapun beberapa tujuan strategis antara lain :

### a. *Empowering Resources (Memberdayakan Sumber Daya)*

Kemajuan teknologi yang pesat seringkali tidak didukung oleh sumber daya yang tepat. Hal tersebut merupakan suatu kendala dalam mewujudkan transformasi digital.

Dari Segi teknologi digital yang efektif tentunya membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Sehingga, memberdayakan seseorang sesuai dengan keahliannya untuk berinteraksi dengan teknologi yang tepat sangatlah penting untuk mengoptimalkan baik pemanfaatan teknologi tersebut, maupun potensi yang dimiliki oleh pekerjanya.

#### **b. Transform Public Services (Mentransformasi Pelayanan Publik)**

Era digital membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai lini usaha termasuk pelayanan publik. Teknologi *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* berpotensi mentransformasikan pelayanan publik menjadi lebih baik, cepat dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah telah berani mengambil langkah dalam mentransformasikan pelayanan publik, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh pelayanan publik mampu bertransaksi secara *online* dan berkerja secara terintegrasi.

Digitalisasi menjadi pilar utama dalam upaya mentransformasi pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi membawa dampak pelayanan publik menjadi lebih ramping, kuat, dan terampil dengan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan digital.

Namun, dalam proses mentransformasikan pelayanan publik terdapat tantangan yang perlu dihadapi yaitu kurangnya koordinasi atau mekanisme untuk mengembangkan kebijakan yang kontekstual dan relevan yang mendukung inovasi digital, peran atau keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak jelas dalam mengembangkan ekosistem inovasi, serta disintegrasi antar sistem.

#### **c. Engage Citizen (Melibatkan Masyarakat)**

Untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai sasaran, baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan lain perlu melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan umpan balik, dan mencari gagasan baru tentang bagaimana transformasi digital berjalan dengan tepat untuk melayani mereka kemudian bersama-sama menciptakan solusi dan layanan dengan masyarakat. Selain itu, memfasilitasi keterlibatan masyarakat akan membantu pemerintah dalam mengembangkan transformasi digital yang akan diadopsi secara optimal. Namun, saat ini belum semua masyarakat Indonesia melek akan teknologi digital sehingga menjadi salah satu hambatan dalam transformasi digital. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan terkait teknologi agar masyarakat juga dapat membantu proses transformasi digital.

Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti *Artificial Intelligence* (AI), *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT) dapat mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital. Sebuah perusahaan tidak dapat menyadari manfaat digitalisasi kecuali ketiga komponen transformasi digital yaitu orang, bisnis, dan teknologi bekerja sama.

Kemudian memasukkan komponen-komponen ini ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari orang-orang seperti *Chief Data and Analytics Officer* (CDAO), *Chief Information Officer* (CIO) atau bahkan CEO. Diharapkan dari hasil kerja sama tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan dan memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan.

#### **d. Optimize Business Ecosystems (Optimalisasi Ekosistem Bisnis)**

Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Cloud Computing* dan *Internet of Things* (IoT) dapat mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital.

Sebuah perusahaan tidak dapat menyadari manfaat digitalisasi kecuali ketiga komponen transformasi digital yaitu orang, bisnis, dan teknologi bekerja bersama. Kemudian memasukkan komponen-komponen ini ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari orang-orang seperti *chief data and analytics officer* (CDAO), *chief information officer* (CIO) atau bahkan CEO. Diharapkan dari hasil kerja sama tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan dan memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan.

### **3. Strategic Process**

Demi tercapainya tujuan transformasi digital terdapat beberapa proses strategis yang terjadi antara lain :

Transformasi digital membutuhkan perubahan organisasi yang berpusat pada pelanggan, didukung oleh kepemimpinan, didorong oleh tantangan radikal terhadap budaya suatu organisasi, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan. Tujuannya adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan karena meningkatnya kualitas pelayanan tersebut. Selain dapat diakses kapanpun dan dimanapun, layanan digital yang mumpuni juga dapat meningkatkan produktivitas penyedia layanan karena adanya otomatisasi. Dalam prosesnya, otomatisasi suatu layanan tentu membutuhkan adopsi teknologi digital, sehingga baik digitasi maupun digitalisasi pasti terjadi. Namun, masih banyak anggapan yang sulit membedakan antara digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital itu sendiri.

#### **a. Digitize**

Menurut Glosarium IT Gartner, *Digitize* atau Digitasi adalah mengubah atau mengekspresikan bentuk analog dalam format digital". Digitasi biasanya mengacu pada pengambilan informasi analog dan menjadikannya dalam bentuk kode nol dan satu sehingga komputer dapat menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi tersebut.

Salah satu contoh digitasi yang paling mudah kita pahami adalah mengubah teks tulisan tangan atau ketikan yang menggunakan kertas menjadi bentuk digital. Namun, definisi digitasi menyiratkan bahwa hanya informasi nya saja yang diubah ke dalam bentuk digital, tidak termasuk prosesnya. Padahal, mentransformasi pelayanan publik secara digital menyebabkan pemerintah harus siap mendesain ulang layanan publik dan model bisnis yang lebih luas sehingga cocok dengan ekosistem digital, dan disinilah peran digitalisasi muncul.

#### **b. Digitalize**

Istilah *digitalize* tidak terdapat dalam kamus *Glosarium TI Gartner*. Namun, jika kita mencari arti *digitalization* sebagai bentuk kata benda dari *digitalize*, maka *digitalization* diartikan sebagai “penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan pendapatan baru dan peluang penghasil nilai”. Kemudian Gartner juga menambahkan “ini adalah proses perpindahan menuju ke bisnis digital” sehingga menimbulkan pertanyaan: apa itu bisnis digital? Menurut i-SCOOP, bisnis digital adalah hasil dari berbagai proses digitalisasi (seperti beralih dari rantai pasokan biasa ke rantai pasokan digital) dan merupakan langkah penting menuju transformasi digital.

Secara singkat, digitasi dapat diartikan sebagai konversi analog ke digital, sedangkan digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data yang didigitasi untuk memengaruhi cara menyelesaikan pekerjaan.

### **4. Strategic Thrust**

Selain diperlukan tujuan, proses, juga perlu adanya dorongan strategi supaya tercapai transformasi digital sesuai goal. Adapun macam-macam dorongan strategi transformasi digital diantaranya :

#### **a. Broadband Infrastructure Connectivity (Konektivitas Infrastruktur Pitalebar)**

Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa infrastruktur TIK merupakan fondasi utama dalam penerapan transformasi digital. Pada bulan Oktober 2019 Presiden Joko Widodo meresmikan Palapa Ring sebagai salah satu infrastruktur *broadband* nasional. Rampungnya Palapa Ring diharapkan dapat menjadi tulang punggung internet cepat yang menghubungkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Namun saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Infrastruktur pendukung transformasi digital sendiri memiliki kompleksitas yang lebih besar dari pemenuhan akses internet. Hal ini pun telah menjadi perhatian Pemerintah yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024 dimana pemenuhan infrastruktur pendukung transformasi digital menjadi salah satu program strategis yang terdiri dari perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (*BTS/Last Mile*), Satelit Satria, peningkatan jangkauan jaringan tetap pitalebar hingga ke tingkat kecamatan, penyediaan Infrastruktur SPBE, dan penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital.

Setidaknya terdapat tiga cakupan infrastruktur yang menjadi target utama untuk mendukung realisasi transformasi digital di Indonesia, yaitu:

- **Jaringan Telekomunikasi**

Membangun dan memperluas konektivitas yang andal bagi Indonesia merupakan salah satu langkah strategis nasional. Sehingga, perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (BTS/ *last mile*) sebagai upaya pemenuhan penyediaan infrastruktur telekomunikasi harus terus dilakukan sebagai prasyarat untuk bertransformasi menuju digitalisasi.

- **Pusat Data Nasional**

Pembangunan Pusat Data Nasional dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi ekosistem TIK pemerintah saat ini. Pusat Data Nasional sendiri merupakan salah satu dari Infrastruktur pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Perpres No.95/2018 tentang SPBE.

Pusat Data Nasional yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong konsolidasi data antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi salah satu solusi kondisi data silos pemerintah yang terjadi di Indonesia saat ini.

- **Penyiaran Digital**

Inisiatif penyiaran digital di Indonesia telah dicetuskan sejak tahun 1997, namun masih belum dapat diimplementasikan hingga saat ini. Salah satu penyebab terhambatnya implemmentasi penyiaran digital adalah pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital yang membutuhkan investasi cukup besar.

Penyelesaian infrastruktur pendukung transformasi digital memerlukan investasi yang tidak sedikit, baik waktu maupun finansial. Proses pembangunannya pun membutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pihak penyedia layanan dan masyarakat agar investasi yang telah dikeluarkan dapat digunakan secara optimal.

- b. **Data Management**

Istilah "*Data is the new oil*" sering kali kita dengar belakangan ini. Istilah tersebut menggambarkan betapa berharganya data di era digital. Namun tentunya, hanya data-data yang *value able* atau berarti yang dapat dimanfaatkan sebagai 'bahan bakar' teknologi yang didorong oleh data (*data-driven*) seperti *big data analytics* dan *artificial intelligence* (AI).

Saat ini, Indonesia masih menghadapi data dan *system silos* yang mengindikasikan lemahnya ekosistem ketersediaan, berbagi-pakai, dan pemanfaatan data yang terintegrasi.

Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perpres No.95 tentang SPBE dan Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bermaksud untuk mendorong ekosistem ketersediaan, berbagi-pakai, dan pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dengan data yang mutakhir dan terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan data yang *valuable* untuk dimanfaatkan bersama dengan teknologi terkini. Beberapa implementasi pemanfaatan data dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

- **Keterbukaan Data**

Keterbukaan data pemerintah diharapkan mampu mewujudkan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

- **Analitik**

Analitik data dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan yang sudah ada dan memanfaatkan kumpulan data baru untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang benar-benar baru.

- **Visualisasi**

Seiring dengan masuknya era digital dimana jumlah data digital semakin meningkat, visualisasi data menjadi sebuah alat yang penting untuk memahami arti dari data-data tersebut. Visualisasi data menyusun data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dan menyajikan kesimpulan dari proses analitik data.

- **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan berdasarkan data melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadikan setiap kebijakan yang diambil semakin akurat, tepat sasaran, minimal risiko dan memiliki dampak yang besar.

**c. Agile Governance (Tata Kelola yang Tangkas)**

Pada era digital ini, tren teknologi berkembang begitu cepat dengan skala yang masif. Pemerintah, atau suatu organisasi pada umumnya dituntut untuk menjadi *responsive* dan adaptif terhadap perubahan, baik itu tren teknologi, maupun tuntutan *customer* atau masyarakat.

Namun masalah yang terjadi saat ini di Indonesia adalah masih banyak instansi pemerintah yang memiliki ego sektoral sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi. Ditambah lagi, Indonesia belum memiliki sosok kepemimpinan -baik itu dalam bentuk perorangan atau organisasi untuk mendorong dan mengarahkan transformasi digital yang sesuai dengan visi dari pelaksanaan transformasi digital itu sendiri. Tak dapat dipungkiri, hal itu menahan Indonesia untuk bersanding dengan negara-negara maju dalam digitalisasi.

Agar transformasi digital dapat mengantarkan Indonesia menuju *strategic goal*, maka Indonesia harus memiliki tata Kelola yang berkemampuan dinamis dan tangkas yang paling tidak memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Adaptif dan Agile**

Tata kelola yang adaptif dan agile memungkinkan suatu negara atau organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan serta senantiasa tangkas dan cepat dalam melahirkan berbagai hal yang bersifat inovatif, terutama dalam menghadapi suatu perubahan yang disruptif atau dalam menghadapi krisis.

- **Transparan**

Tata kelola yang transparan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

- **Sinergi dan Kolaborasi**

Pemerintah harus menciptakan ekosistem kolaborasi multistakeholder yang terdiri dari akademisi, pelaku bisnis serta komunitas yang dapat saling bersinergi untuk menciptakan transformasi digital yang ideal.

- **Keamanan Siber yang dapat diandalkan**

Serangan siber adalah musuh yang tidak kasat mata, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran akan betapa pentingnya keamanan siber. Lemahnya keamanan siber di Indonesia ditandai oleh banyaknya situs pemerintah dan kementerian yang diretas kelompok peretas. Hal ini disebabkan oleh *maintenance* situs pemerintah yang bersifat *project based* yang sifatnya jangka pendek. Inilah yang menjadi celah peretas untuk membebani atau mengambil alih laman situs tersebut. Keamanan siber tidak hanya mencakup kerentanan situs web terhadap peretasan, namun juga termasuk tata kelola seperti tersedianya kebijakan yang mendukung perlindungan data.

**d. Digital Talent (Talenta Digital)**

Sumber Daya Manusia yang mumpuni memiliki peran signifikan dalam mewujudkan transformasi digital. Jika transformasi digital diibaratkan sebagai perjalanan untuk menuju sebuah tempat yaitu *strategic goal*, maka talenta digital adalah pengemudi yang mengantarkankita kepada *strategic goal*.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa kendala dalam menyiapkan talenta digital, diantaranya adalah adanya *skills gap* antara kebutuhan industri dan jumlah pekerja TIK dan lemahnya *link and match* antara *skill* dan kebutuhan industri. Namun, di sisi lain, permintaan pekerja TIK dipaksa untuk tumbuh secara eksponensial karena industri TIK semakin berkembang melalui infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik. Sebuah laporan dari KPMG mengindikasikan bahwa Indonesia dapat menghadapi kekurangan sekitar Sembilan juta pekerja TIK terampil dan semi-terampil antara tahun 2016–2030, kecuali pelatihan keterampilan ditingkatkan secara drastis.

Beberapa ketrampilan yang harus dimiliki oleh talenta digital untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dan perkembangan teknologi antara lain:

- **Pola Pikir Digital**

Pola pikir digital bukanlah sekedar kemampuan untuk menggunakan teknologi. Pola pikir digital juga merangkap sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melihat peluang serta mampu membuat dan menerapkan strategi inovasi dari penggunaan teknologi.

- **Pemikiran Logis**

Berpikir secara logis merupakan tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Berpikir secara logis diperlukan saat kita menggunakan teknologi digital untuk memecahkan suatu masalah.

- **Ilmu Seni**

Di tengah dunia yang semakin kompetitif, keberadaan ilmu seni dalam digitalisasi memiliki peran penting agar suatu teknologi digital mampu menjangkau target yang luas dan memiliki proses antarmuka yang menarik

- **Inovatif**

Transformasi digital dinilai membuka banyak peluang inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang ada untuk membangun konsep bisnis atau layanan baru. Seseorang atau suatu organisasi diharapkan harus mampu berpikir secara inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan suatu terobosan.



## 5. Strategic Foundations

### a. Culture (Budaya)

Ketika suatu organisasi melakukan transformasi digital dengan hanya berfokus pada teknologi tanpa mengindahkan faktor budaya digital, hal itu dapat menghambat proses transformasi digital di berbagai bidang. Dalam laporan Deloitte “Future risks in the digital era” terdapat contoh mengenai suatu organisasi jasa keuangan yang berusaha mengadopsi otomatisasi proses robotik meskipun budaya organisasi nampaknya belum siap untuk mengadopsi teknologi baru. Karena keengganan karyawan, organisasi tersebut tidak dapat menggunakan *bot* untuk menjalankan proses satu tahun setelah implementasi awal.

Selain itu, kegagalan untuk menyelaraskan tujuan transformasi digital dengan nilai-nilai dan perilaku karyawan dapat menciptakan risiko tambahan pada budaya organisasi, seperti semangat kerja yang rendah dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan potensi keahlian yang ada. Memastikan transformasi selaras dengan budaya digital suatu organisasi dapat mengurangi tantangan dan hambatan untuk merealisasikan transformasi digital.

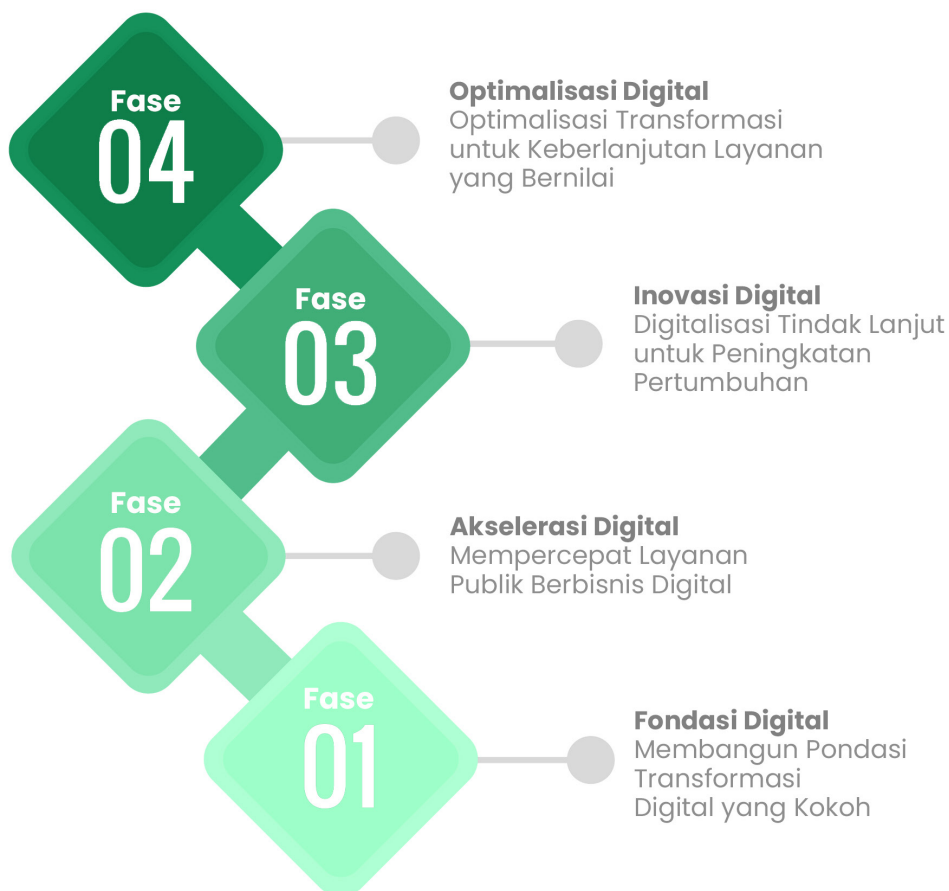


Dalam transformasi digital, sangatlah penting untuk menciptakan budaya di mana semua orang paham teknologi dan di mana semua orang sadar bahwa terdapat risiko yang menjadi tanggung jawab bersama. Budaya yang kuat yang selaras dengan strategi bisnis dapat mendorong kemampuan organisasi untuk mempercepat kinerja dan melampaui pesaing, terutama di era digital ini.

## 2. Policy (Kebijakan)

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki diversitas yang sangat besar. Sehingga pemerataan di berbagai sektor, termasuk kemampuan dan penyediaan akses digital menjadi kendala realisasi transformasi digital. Keadaan tersebut membuat pendekatan *top-down* dalam menjalankan sebuah perubahan menjadi lebih tepat. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan dengan visi yang jelas dan tepat sasaran dapat menjadi pendorong transformasi digital yang komprehensif dan inklusif.

Gambar 5. Tahapan Transformasi



Sumber: Buku Peta Jalan Transformasi Digital WANTIKNAS, 2020

## FASE 01 FONDASI DIGITAL

### Infrastruktur

**Strategi menjadikan infrastruktur digital sebagai proyek strategis.** Membangun fondasi transformasi digital yang kokoh dengan beberapa inisiatif dilakukan yaitu membangun Data Center Nasional dan DRvc'tC, keberadaan data center ini akan mendukung kepentingan pengambilan kebijakan berbasis data atau *data driven policy* sehingga bisa dilakukan secara cepat dan lebih akurat. Kemudian inisiatif lainnya adalah melakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Telekomunikasi secara berkala, menyusun kebijakan *cloud computing*, mengalokasi APBN untuk perluasan jangkauan jaringan telekomunikasi, mengembangkan Jaringan Intra-Pemerintah, dan mempercepat pengembangan *Government Service Bus* (GSB).

**Strategi membangun konektivitas yang handal.** Pada strategi ini, inisiatif yang dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi perizinan dan keringanan pajak dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, membangun infrastruktur pasif seperti *ducting* bersama, memperluas jangkauan jaringan *mobile broadband* (BTS/Lasmile), memperluas jangkauan *fixed broadband* sampai ke tingkat desa dan kelurahan, dan mengembangkan satelit satria untuk mendukung pembangunan transformasi digital di Indonesia.

### Data

**Strategi Membangun Fondasi *Data Driven*.** Beberapa strategi yang dijalankan yaitu membangun fondasi *data driven*. Kemudian inisiatif yang dilakukan yaitu menyusun kerangka kerja *data driven* Nasional karena memandang pentingnya *data driven* untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, menyusun arsitektur data nasional, mengintegrasikan data dasar (data kependudukan, geospasial, dsb) terhadap layanan publik tertentu.

**Strategi menciptakan kepemimpinan data yang baik.** Kemudian inisiatif yang dilakukan yaitu menunjuk pemimpin pada setiap institusi yang menggunakan data dalam meningkatkan aktivitas operasionalnya, bersinergi dan kolaborasi antar institusi dalam hal berbagi data.

**Strategi menciptakan lingkungan keterbukaan data yang modern.** Inisiatif yang dilakukan pada strategi ini yaitu menyediakan alat dan pelatihan untuk pegawai/ petugas data dalam mengelola data inventaris dan proses publikasi data, mengembangkan mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat yang ingin meminta informasi yaitu (1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Selain itu, inisiatif lainnya dengan berkomitmen untuk membuat aturan data dan transaksi terhadap *legacy system* agar datanya dapat digunakan kembali, dan menetapkan kepengurusan data di tingkat pusat dan daerah.

**Strategi merangkul pegawai, komunitas, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi data.** Strategi ini dapat dituangkan dalam inisiatif, seperti memberikan pelatihan keterampilan dasar terkait data untuk pejabat publik, dan menyediakan dataset untuk pejabat publik dan masyarakat.

## Talenta Digital

**Strategi memahami dan meningkatkan kemampuan digital.** Urgensi kebutuhan talenta digital menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan *skill* digital sumber daya manusia. Inisiatif yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan kemampuan digital, keterampilan di masa mendatang, kemudian menyusun kerangka kerja talenta digital Indonesia agar dapat dipetakan sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SKKNI bidang TIK sesuai dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, melibatkan industri, akademisi, komunitas dan masyarakat dalam merumuskan SKKNI bidang TIK agar adanya sinkronisasi antar stakeholder, dan inisiatif terakhir dengan menyelaraskan kurikulum terkait TIK sesuai kebutuhan industri.

**Strategi membangun fondasi keterampilan untuk kemampuan yang lebih baik.** Untuk mendorong keterampilan digital sumber daya manusia membutuhkan inisiatif yang selaras. Seperti memberikan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan bagi para pemimpin dan pekerja layanan publik, dan sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pada sektor pendidikan dan industri.

## Keamanan

**Strategi menciptakan strategi keamanan dan kebijakan keamanan siber.** Era digital mendorong pemerintah untuk tetap waspada terhadap ancaman siber. Menjadi isu prioritas seluruh negara, inisiatif yang perlu dilakukan dengan membuat strategi keamanan siber nasional dengan tujuan agar tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber, dan keamanan siber pada ekonomi digital. Selain itu, inisiatif lainnya dapat membangun perlindungan data dan kebijakan privasi yang komprehensif, dan membuat aturan keamanan siber yang sejalan dengan peta jalan transformasi digital.

**Strategi membangun kepemimpinan keamanan digital.** Tidak dipungkiri kepemimpinan memiliki pengaruh besar dalam keamanan digital. Kesuksesan transformasi digital dan menjaga keamanan siber juga tidak lepas dari kebijakan dan komitmen tinggi pimpinan. Dalam hal ini, inisiatif yang dapat dilakukan yaitu mendorong kepedulian pimpinan terhadap keamanan data digital di setiap lembaga.

## Tata Kelola

**Strategi mendorong Orchestrator Digital.** Istilah konsep *orchestrator* digital sudah tidak asing lagi pada era digital. Konsep ini dapat mengintegrasikan antar proses yang telah berjalan dari beragam lingkungan sistem dan lokasi yang berbeda. Inisiatif yang dapat dilakukan dengan menentukan *National Chief Digital Officer* sehingga dapat bertanggung jawab pada strategi data dan tata kelola. Selain itu, inisiatif lainnya dengan menentukan Pemimpin Nasional untuk Keamanan, Data, Informasi, Teknologi, dan memperkuat peran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) sebagai lembaga stakeholder yang berfokus pada pengembangan transformasi digital Indonesia.

**Strategi sinergi, koordinasi dan kolaborasi.** Strategi ini menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan transformasi digital. Pemerintah dapat mendorong dengan inisiatif membentuk komite TIK pada setiap Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah, berkolaborasi dengan sektor lain termasuk usaha kecil dan menengah, akademisi dan komunitas lokal, dan akademis, dan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk semua proyek dan kegiatan TIK.

**Strategi meningkatkan standar dan praktek digital.** Kemudian inisiatif yang dilakukan yaitu memastikan semua lembaga mengembangkan peta jalan digital yang jelas, selaras dengan strategi transformasi digital Indonesia, membangun arsitektur digital dan sistem repository untuk pemerintah, mendorong institusi/lembaga untuk mengikuti standar dan kerangka kerja yang sama - misalnya, standar web pemerintah dan sistem desain, menginisiasi penelitian untuk memahami dampak inklusi digital pada hasil jangka panjang di bidang sosial dan ekonomi, mengadopsi metodologi *Agile* sebagai karakteristik transformasi.

## Layanan Publik

**Strategi memastikan aturan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuannya.** Kemudian inisiatif yang dilakukan yaitu menugaskan seorang pemimpin di setiap lembaga pemerintah untuk urusan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, mengadopsi praktek-praktek dan *tools/* alat-alat digital untuk pengembangan kebijakan, menciptakan pendekatan sistematis secara bersama-sama untuk pertimbangan etika dalam penerapan teknologi baru dan pengembangan layanan, meninjau regulasi terkait transportasi untuk mendorong penggunaan teknologi baru, dan menciptakan lingkungan regulasi untuk mendukung sektor teknologi keuangan (*fintech*), membangun aplikasi umum (G2E, G2B, G2C, G2G).

**Strategi akselerasi digitalisasi sektor publik.** Dengan strategi akselerasi digitalisasi sektor publik maka dapat dilakukan inisiatif dengan mempercepat implementasi kesehatan digital (*digital health*), mengembangkan pendidikan digital, mengembangkan ID Digital Indonesia, Memulai pengadopsian teknologi yang lebih canggih (contoh: AI, IoT, Big Data), mempromosikan literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merekrut tenaga profesional dalam mempercepat digitalisasi layanan.

**Strategi membangun interoperabilitas sistem.** Kemudian inisiatif yang dilakukan yaitu mendukung dan memprioritaskan pengembangan API utama pemerintah, dan mengembangkan platform berkelanjutan yang dapat dibagikan lintas pemerintah.

## FASE 02 AKSELERASI DIGITAL

### Infrastruktur

**Strategi meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan dengan harga layanan yang terjangkau.** Percepatan Layanan Publik Berbasis Digital menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, perlu beberapa inisiatif yang harus dilaksanakan antara lain meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan dengan harga layanan yang terjangkau, memperluas jangkauan satelit sampai pada area yang belum terjangkau internet, serta menyediakan wadah kolaborasi bagi operator telekomunikasi terkait persaingan harga layanan internet.

### Data

**Strategi memanfaatkan data untuk layanan yang lebih baik.** *Data is new oil*, oleh karena itu pentingnya sebuah data dalam layanan publik. Adapun inisiatif yang dapat dilakukan dengan mendukung pemerintahan yang terbuka dan transparan melalui program informasi dan data pemerintah secara terbuka, menggunakan data untuk meningkatkan kehidupan warga negara Indonesia yang rentan melalui pendekatan investasi sosial, memungkinkan berbagi informasi yang aman antar lembaga dan LSM untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta menyatukan informasi pemerintah melalui portal Indonesia.



**Strategi Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Data.** Untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah maka perlu inisiatif yang dilakukan dengan mengembangkan pilihan berbagi data internal baik data streaming maupun data statis, melaporkan dan menerbitkan data kinerja, serta standarisasi publikasi data, analisis, dan visualisasi.

## Talenta Digital

**Strategi mendorong penguatan sertifikasi kompetensi.** Dengan inisiatif meningkatkan kualitas lembaga sertifikasi profesi bidang TIK, menyediakan pelatihan kompetensi digital untuk pejabat publik, mempermudah bisnis untuk memiliki karyawan bersertifikat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sendiri telah memiliki program Government Transformation Academy (GTA) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN, TNI, dan Polri untuk mendukung transformasi digital. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan pelatihan talenta digital untuk peningkatan keahlian digital masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Lebih dari itu, pemerintah juga dapat mempersiapkan sumber daya kompetitif, dengan inisiatif meninjau kebijakan dalam mendukung masyarakat usia lanjut untuk mempelajari teknologi baru, serta meningkatkan akses untuk belajar melalui penggunaan teknologi bantu (*assistive technology*).

## Keamanan

**Strategi menyeimbangkan keamanan, privasi, dan inovasi.** Pemerintah dapat melakukan inisiatif antara lain membuat sistem keamanan informasi nasional, mempromosikan pendidikan dan pelatihan keamanan siber termasuk membangun tenaga kerja profesional bersertifikasi keamanan siber, mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu secara *online*, memberikan masyarakat akses terhadap saran dan petunjuk terkait privasi, dan mempermudah UMKM untuk membuat pernyataan privasi mereka sesuai dengan undang-undang.

## Tata Kelola

**Strategi memprioritaskan investasi untuk optimasi digital yang berkelanjutan.** Dengan inisiatif Mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi ke dalam proses anggaran untuk memastikan investasi dalam sistem digital dan data diprioritaskan dan dikoordinasikan, kemudian meninjau apakah perencanaan dan pendanaan yang berkelanjutan akan mendukung pemerintah dengan lebih baik dalam era digital apabila dibandingkan dengan siklus perencanaan dan pendanaan tahunan, dan menciptakan budaya inovasi dan digitalisasi yang berfokus pada nilai dengan indikator kinerja utama tingkat-dewan untuk mengukur kemajuan di semua dimensi.

**Strategi mendorong penyelesaian masalah secara inovatif.** Inisiatif yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah secara inovatif antara lain menerapkan tata kelola TIK berdasarkan praktik terbaik yang mengadopsi kemampuan dinamis, memfasilitasi pelatihan kepemimpinan digital yang memiliki pengaruh dalam transformasi digital. Selain itu, dapat mendorong sektor publik untuk mengeksplorasi peluang yang didorong oleh TIK melalui strategi TIK. Kolaborasi stakeholder menjadi salah satu kunci dalam penyelesaian seperti bermitra dengan industri untuk memecahkan permasalahan pemerintah yang kompleks, mengadopsi cara kerja yang lebih baik yang dapat mempersatukan orang-orang secara cepat dan efisien serta mengurangi risiko, serta mendukung *start-ups* dan komersialisasi penelitian melalui inovasi inkubator dan akselerator.

## Layanan Publik

**Strategi meningkatkan adopsi dan layanan digital.** Optimalisasi pemerintah dalam layanan publik dapat meningkatkan adopsi dan layanan digital dengan inisiatif yang dilakukan meningkatkan UI/UX layanan publik digital. Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap layanan digital, sehingga pelayanan digital bisa terus melakukan evaluasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selain itu, dengan mendorong UMKM untuk merebut peluang teknologi digital melalui peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan untuk bertransformasi ke arah digital.

**Strategi memastikan kolaborasi interaksi digital.** Kunci kolaborasi adalah dengan inisiatif memungkinkan interaksi digital yang lebih baik antara individu, bisnis, dan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, mendorong adopsi pembayaran digital yang lebih luas, menetapkan kondisi (sistem) yang akan memajukan upaya inklusi digital bagi mereka yang kurang beruntung secara digital, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan mobilitas lintas instansi termasuk pendekatan teknologi tempat kerja yang memungkinkan pergerakan orang dan kolaborasi lintas instansi, dan mengintegrasikan proses bisnis untuk layanan umum.

## FASE 03 INOVASI DIGITAL

### Infrastruktur

**Strategi mendorong penggunaan teknologi dalam peningkatan produktivitas ekonomi.** Digitalisasi tingkat lanjut untuk peningkatan pertumbuhan dari sisi infrastruktur, pemerintah dapat mengadopsi inisiatif seperti melakukan sosialisasi dan promosi terkait *home connect* untuk masyarakat di area yang telah terjangkau jaringan *fixed broadband*, mempromosikan penggunaan teknologi digital melalui *roadshow* untuk usaha kecil menengah dan acara penyelesaian pergelaran *broadband*, serta mendorong pertumbuhan penggunaan *cloud* dalam negeri.

### Data

**Strategi fokus pada data analitik.** Dengan mengadakan program data secara berjangka dalam mendorong penggunaan data untuk analitik dan inovasi di sektor publik dan swasta, identifikasi kesenjangan dengan melakukan survei pada kumpulan data yang populer di beberapa organisasi dengan program data terbuka yang lebih baik, memberikan pelatihan untuk pengambil keputusan dan pejabat publik dalam meningkatkan literasi data, analisis data, dan visualisasi, serta menerapkan proses bisnis yang terhubung antara analitik data dan data terbuka. Fase tiga mendorong untuk berfokus pada integrasi data, sehingga baik di sektor pemerintah dan swasta dapat memanfaatkan hasil data analitik dalam pengambilan keputusan hingga proses bisnis.

### Talenta Digital

**Strategi mendukung konektivitas yang lebih luas untuk tujuan dan komunitas tertentu.** Inisiatif yang dijalankan antara lain mengidentifikasi dan menumbuhkan bakat di semua tingkatan dan multidisiplin, mendukung keterlibatan sosial tuna rungu melalui layanan penerjemahan video, menumbuhkan jumlah pendaftaran dan lulusan untuk disiplin ilmu seperti teknik, tik, dan ilmu terapan, membekali karyawan dan pelaku bisnis Indonesia dengan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan digital yang terdepan, mendorong pertumbuhan *local makers*.

**Strategi memberikan nilai/manfaat bagi masyarakat dan dunia bisnis dengan mengelola biaya dan risiko.** Dengan beberapa inisiatif yaitu melindungi informasi yang bersifat strategis dan meningkatkan kemampuan keamanan siber pada sektor publik, membangun ekosistem identitas digital yang koheren untuk masyarakat dan organisasi, yang memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu dan akurat dengan mempertimbangkan pilihan, kenyamanan, kontrol, dan privasi. Inisiatif lainnya dengan mendorong pendekatan yang lebih praktis dan efektif untuk manajemen risiko terkait kemampuan digital.

## Tata Kelola

**Tata Kelola memerlukan strategi menumbuhkan ekosistem inovasi dan mendukung potensi lokal** dengan inisiatif memfasilitasi pertumbuhan ekosistem dengan menyederhanakan aturan dan hukum korporasi, menciptakan pekerjaan dan peluang yang bernilai tinggi, memanfaatkan landasan dalam memberikan pengaruh untuk keterbukaan inovasi dan akses terhadap kapabilitas pemerintah kepada pihak lain, mendesain-ulang ekosistem bisnis operator telekomunikasi.

**Strategi mempercepat investasi untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi.** Inisiatifnya adalah bekerja sama dengan perbendaharaan negara untuk terus meningkatkan pengelolaan sumber daya publik di ruang digital, data, dan TIK. Kemudian memperluas lensa investasi digital, data, dan TIK dengan mempertimbangkan masalah sosial dan lingkungan.

## Layanan Publik

**Strategi digitalisasi sektor secara merata.** Membangun platform umum untuk memfasilitasi mobilitas lintas institusi termasuk pendekatan terhadap teknologi di tempat kerja (misalnya: *teleconference*, aplikasi kolaborasi, dll), mengembangkan aplikasi umum yang sesuai dengan standar proses bisnis, mempercepat adopsi teknologi IoT, dan mempercepat adopsi yang aman dari teknologi kecerdasan buatan bisa menjadi rekomendasi dalam peningkatan layanan publik agar proses transformasi digital merata dan digitalisasi merata di seluruh sektor.

## FASE 04 OPTIMALISASI DIGITAL

### Infrastruktur

**Strategi optimalisasi ketersediaan jaringan melalui kolaborasi multistakeholder** dengan inisiatif optimalisasi perangkat pusat data dan DRC, memantau dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan jaringan nasional, dan melakukan kolaborasi multistakeholder dalam mengoptimalisasi kualitas jaringan nasional.

### Data

**Strategi memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau.** Menyediakan data berkualitas tinggi kepada publik, tepat waktu dan dalam format yang mudah dimengerti. Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, maka pelayanan publik harus diselenggarakan seoptimal mungkin dalam hal data. Selain itu, inisiatif lainnya dengan menerapkan proses bisnis yang terhubung antara analitik data dan pengukuran kinerja, memungkinkan berbagi data dan praktik terbaik berbagi antar lembaga dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, serta penyediaan layanan yang lebih baik, memanfaatkan analitik data dalam mendukung pengambilan keputusan untuk semua kegiatan utama.



## Talenta Digital

**Strategi berinvestasi untuk tenaga kerja yang siap di masa depan.** Inisiatif yang dilakukan yaitu memperluas kurikulum pendidikan nasional, memfasilitasi berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan inovasi bersama yang lebih besar di seluruh sektor publik, meluncurkan pendanaan untuk proyek-proyek pendidikan dan teknologi digital, meninjau regulasi untuk mendorong inovasi dalam pendidikan sekolah, menyediakan wadah kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Kesiapan tenaga kerja akan mendorong berkembangnya talenta digital, karena digitalisasi sudah masuk ke semua lini kehidupan. Kolaborasi multi-stakeholder dan optimisasi pendidikan guna memastikan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan dan permintaan talenta digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan pelaku dunia pendidikan, usaha, dan industri.

## Keamanan

**Strategi mempertahankan intensi kebijakan dan legislasi.** Mengembangkan prinsip dan panduan yang mendukung kemitraan pemerintah terbuka/*open government* dan dibangun berdasarkan kerja sistem mengenai privasi, etika, keamanan, dan kepercayaan, dan memanfaatkan kapabilitas identitas modern untuk memberikan masyarakat kendali lebih besar terhadap informasi mereka. Seperti memungkinkan masyarakat untuk menyetujui berbagi informasi pribadi dengan instansi pemerintah dan penyedia layanan lainnya. Selain itu, dalam hal keamanan dapat melakukan kerjasama keamanan siber internasional.

## Tata Kelola

**Strategi mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan transformasi digital** dengan berinvestasi pada universitas yang mendorong praktik kewirausahaan dan mendukung inovasi yang digerakan oleh guru melalui pendanaan khusus.

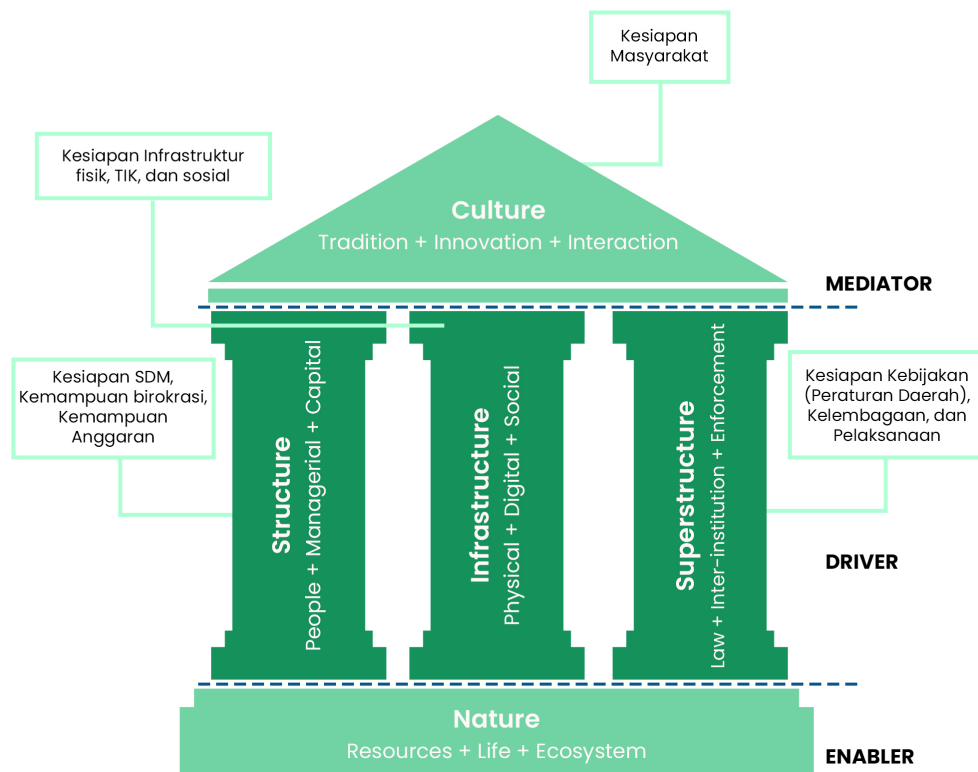
## Layanan Publik

**Strategi mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan transformasi digital** dengan memantau dan mengevaluasi layanan sektor publik.

## Proses Transformasi Digital

Pada prosesnya, transformasi digital akan melalui empat fase yang harus dilalui satu persatu sebagai syarat untuk naik pada fase selanjutnya. Fase pertama adalah membangun fondasi transformasi digital yang kokoh. Fase ini menjadi awal dari seluruh fase yang akan dilalui. Pada fase ini yang dilakukan adalah mempersiapkan kebutuhan dasar dalam transformasi digital seperti infrastruktur dan literasi digital. Kemudian di tahap kedua adalah fase akselerasi digital. Pada fase ini pemerintah harus melakukan percepatan layanan publik berbasis teknologi digital dengan memanfaatkan fondasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah inovasi digital, di mana sebagai tindak lanjut dari fase kedua yang merupakan perbaikan, penyempurnaan, atau inovasi untuk menjawab kebutuhan layanan masyarakat. Di tahap terakhir adalah fase optimalisasi digital sebagai langkah pengoptimalan capaian-capaian yang telah diraih pada fase sebelumnya untuk keberlanjutan layanan yang bernilai.

**Gambar 6. Kerangka Pikir Smart City**

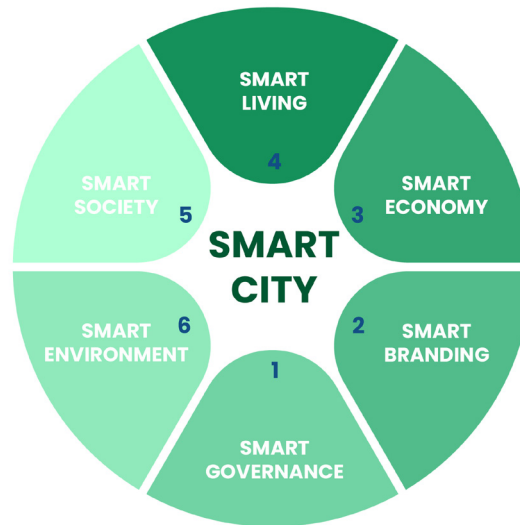


Sumber: Peraturan Bupati Sumedang No. 15 Tahun 2021 tentang Masterplan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region

## Transformasi Menuju Smart City

*Smart City* didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan TIK untuk menghubungkan, memantau, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 7. Dimensi Smart City



Sumber: Peraturan Bupati Sumedang No.15 Tahun 2021 tentang Masterplan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region

Definisi lain *Smart City* adalah “A developed urban area that creates sustainable economic development and high quality of life by excelling in multiple key areas: economy, mobility, environment, people, living, and government. Excelling in these key areas can be done so through strong human capital, social capital, and/or ICT (Information, Communication, and Technology) infrastructure”.

Artinya “Perkotaan yang telah berkembang dengan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup dengan memiliki keunggulan di berbagai bidang, misalnya ekonomi, mobilitas, lingkungan, masyarakat, kehidupan, dan pemerintahan. Keunggulan ini dapat diperoleh dengan sumber daya manusia, kondisi sosial, maupun infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang kuat.

1. *Smart Governance*, yakni terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta dukungan partisipasi masyarakat yang kuat;
2. *Smart Economy*, yang mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan peningkatan daya saing pasar;
3. *Smart Branding*, yakni inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota;
4. *Smart Living*, yakni terbangunnya nilai-nilai budaya yang dinamis serta positif dalam sebuah masyarakat, juga mencakup transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi serta memanfaatkan teknologi untuk efektivitas dan efisiensi yang maksimal;
5. *Smart Society*, yakni adanya sumber daya manusia mampu secara kreatif mendayagunakan, baik itu modal ekonomi (*economic capital*) maupun modal sosial (*social capital*)

## Landasan Hukum Transformasi Digital Indonesia

### **Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government**

Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

**Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pita Lebar Indonesia (RPI) 2014-2019.** Rencana Pitalebar Indonesia ditetapkan untuk mengarahkan strategi percepatan untuk mengembangkan *broadband* yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia.

### **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

### **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**

Melalui layanan pengelolaan data terpadu, pemerintah bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pembangunan.

### **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024**

Perencanaan kebijakan yang komprehensif dalam pemanfaatan transformasi digital untuk kelangsungan dan distribusi pertumbuhan ekonomi.

### **Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045**

Kebijakan ini fokus pada bidang kecerdasan buatan dan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan di bidang teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

### **Lima (5) langkah Percepatan Transformasi Digital**

Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Siapkan betul *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Percepat integrasi Pusat Data Nasional. Siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya.

# 03 LANGKAH TRANSFORMASI DIGITAL KABUPATEN SUMEDANG

Langkah transformasi digital yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang bukan tanpa alasan, bila dilihat dari kondisinya pada tahun 2018, tercatat jalan yang berkondisi baik sebesar 62.8 persen, 15.48 persen berkondisi sedang, 12.93 persen rusak dan 8.66 persen rusak berat. Untuk sarana komunikasi, pada tahun 2017-2018 ada penurunan jumlah kantor pos pembantu, dimana kantor LE (Loket Ekstensi) juga termasuk dicatat sebagai kantor pos pembantu dalam publikasi ini, Dengan rincian 15 kantor cabang dan 2 kantor LE.

Di samping itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2018, atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar 32.539,36 juta rupiah, Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 22.517,1587 juta rupiah, Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau LPE Kabupaten Sumedang tahun 2018 yaitu sebesar 5.83 persen.

Berdasarkan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2018 mencapai Rp. 2.749.895.748.773,30. Dari jumlah tersebut, pendapatan paling besar bersumber dari dana perimbangan yang mencapai 59,59 persen dari total pendapatan.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 15,72 persen dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 24,69 persen. Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2018 mencapai Rp. 2.690.070.783.461,22 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 59,84 persen dan belanja langsung sebesar 40,16 persen.

Adapun kondisi sebelum transformasi digital, antara lain:

- Indeks SPBE Nasional masih rendah dengan perolehan 2.48.
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh 48.58.
- Indeks Prof ASN sebesar 52
- Indeks Sistem MERIT sebanyak 207
- Indeks YANLIK masih belum ada
- IDD masih kurang inovatif
- Angka Kemiskinan sebesar 9.76%
- Angka *Stunting* sebesar 32.20%
- IPM sebesar 70,99
- Indeks GINI sebesar 0,42
- Desa Mandiri sebanyak 1 desa.

## Tahapan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang

Jika saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu mendapatkan pujian dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Merves), Luhut B. Pandjaitan, mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menuju pemerintahan yang kreatif dan adaptif memanfaatkan sistem informasi digital dalam manajemen pemerintahannya. Karena menurutnya, belum banyak pemerintah daerah yang berani melakukan lompatan dan keluar dari kebiasaan selama ini. Sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Namun keberhasilan ini bukanlah datang tiba-tiba, Kabupaten Sumedang juga melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah dalam perencanaannya, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengadopsi konsep transformasi digital nasional dari WANTIKNAS. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sumedang menjadi empat tahap :

### 2020

#### *Driver Level*

Di fase pertama, Kabupaten Sumedang berhasil membangun 96% infrastruktur digital dengan pembangunan fiber optik ke seluruh desa di Kabupaten Sumedang. Dengan rincian dari total 277 desa dan kelurahan, saat ini sebanyak 227 desa dan kelurahan sudah terpasang fiber optik dan 50 desa kelurahan akan diselesaikan pembangunannya di akhir tahun 2022. Selain itu, wifi gratis telah terpasang di 109 titik yang dapat diakses di tempat strategis seperti kantor desa, pesantren, layanan kesehatan, sekolah dan kampus.

Pengadaan infrastruktur internet yang dilakukan pada tahun 2020 ini dilakukan dengan bantuan provider ini dilakukan karena memang sejatinya Kabupaten Sumedang tidak memiliki dana. Dikutip dari pemberitaan di [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com) disebutkan bahwa hingga tahun 2020 masih ada sekitar 143 dusun yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sumedang masih blank spot atau tidak terdapat jaringan internet.

Sulitnya akses internet untuk masuk ke wilayah-wilayah tersebut tidak lain karena faktor geografis wilayahnya yang kebanyakan daerahnya berada di pegunungan dan lembah sehingga sulit untuk menjangkau jaringan internet.

Wilayah kecamatan yang masih blank spot jaringan internet tersebut di antaranya, di Kecamatan Wado Desa Cimungkal ada 4 dusun, Desa Ganjaresik 5 dusun, dan Desa Sukajadi 6 dusun. Kemudian, ada di Kecamatan Jatuninggal Desa Cimanintin, Kecamatan Cibugel Desa Cibugel, Kecamatan Cisitu Desa Cimarga, Kecamatan Siturana Desa Bambang, dan daerah yang lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, Kabupaten Sumedang melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga berhasil membawa jaringan internet hingga ke pelosok desa sebagai prasyarat transformasi digital. Sampai saat ini penyediaan infrastruktur tersebut masih berjalan dan menuju sempurna. Bahkan dengan kolaborasi, Kabupaten Sumedang bisa mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan tanpa banyak mengeluarkan biaya.

Selain persoalan infrastruktur, pada fase pertama ini pemerintahan Kabupaten Sumedang juga melakukan perbaikan budaya kerja. Mengutip pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman para abdi negara di Kabupaten Sumedang dituntut untuk kerja keras sekeras-kerasnya, kerja cerdas, secerdas-cerdasnya kerja ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, kerja cepat, secepat-cepatnya. Menurutnya dengan demikian transformasi digital bisa dilakukan.

Tuntutan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas ini menjadi kewajiban bagi semua level Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sumedang, termasuk di level pimpinan. Pentingnya *leadership* dan SDM Kolaborasi memang sesuatu yang sangat penting dalam





pelaksanaan transformasi digital. Ini sejalan dengan pernyataan anggota Tim Pelaksana Wantiknas Prof Zainal Arifin Hasibuan bahwa untuk bisa melakukan transformasi digital diperlukan sebuah proses mulai dari *culture*, *mindset* kemudian *leadership*. Perlu proses mulai dari *culture* yang harus dirubah dari *culture* non digital menjadi digital. Kemudian *mindset*, dalam hal ini kita akan kewalahan karena sulit untuk diubah. Kemudian ekosistem teknologi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya, ABGC, ekosistem ini perlu dibangun. Maka untuk itu dibutuhkan seorang *leader*.

Selain persoalan komitmen *leadership*, yang juga dilakukan pada periode pertama adalah menjawab tantangan ketersediaan SDM yang mumpuni. Karena transformasi digital hanya bisa sukses apabila didukung oleh SDM yang berkualitas. Data Bank Dunia menunjukkan Indonesia sedang mengalami *digital talent gap* atau kesenjangan talenta digital. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun atau rata-rata 600 ribu talenta digital setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kabupaten Sumedang melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah membentuk satu team khusus yang diambil dari siswa SMK dan mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan sambil berjalan pendidikan khusus atau dielaborasi keampuannya bagi seluruh ASN. Kemudian yang terakhir, lanjutnya, adalah dengan memperkuat literasi digital di masyarakat. Harapannya masyarakat menjadi tahu bahwa Sumedang sudah bertransformasi dari budaya manual ke digital sehingga masyarakat pun siap untuk menerima perubahan ini. Fase pertama ini berhasil mengantarkan Kabupaten Sumedang mendapatkan indeks SPBE di angka 3,81 pada 2020. Fase ini melahirkan inovasi digital birokrasi yaitu aplikasi *e-Office* ASN dan Tahu Sumedang. Kemudian, inovasi digital desa yaitu *e-Office* Desa dan *e-SAKIP* Desa.

## 2021 *Enabler Level*

Keberhasilan pada fase *Driver Level* di 2020 membuat Kabupaten Sumedang menjadi lebih percaya diri untuk berinovasi. Salah satu keberhasilan ini terlihat dari angka prevalensi *stunting* yang turun hingga 50 persen di tahun 2021 dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dari ranking 28 ke ranking 1 di Jawa Barat.

Pada level ini pemerintah Kabupaten Sumedang berkonsentrasi pada pengintegrasian layanan dasar super apps *e-Office*, super apps *e-Office* Desa, serta aplikasi Tahu Sumedang. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mengelaborasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip), dan mal pelayanan publik (MPP).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Sakip merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di Sumedang, pelaksanaan sakip telah diterapkan hingga ke level desa atau setara dengan kelurahan yang dilaksanakan secara elektronik.

Ini diwujudkan dalam pengembangan *digital public service mall* atau mal pelayanan publik (MPP) digital. MPP yang telah ada sejak tahun 2019 ini terus bertransformasi dari manual menjadi digital, mulai dari web base kemudian bertransformasi ke basis aplikasi. Hasilnya berbagai layanan publik bisa di-download di playstore dan masyarakat bisa mengakses 361 jenis layanan yang meliputi layanan administrasi, perizinan, dan non perizinan dari 24 instansi yang bergabung melalui handphone. Di fase ini juga dilakukan transformasi berbasis



*messaging*, yaitu melalui aplikasi Wakepo (*WhatsApp* Kebutuhan Informasi dan Pelayanan *Online* Kabupaten Sumedang).

Keberhasilan lainnya di tahun 2021 adalah dengan diluncurkannya aplikasi e-Simpat. Aplikasi ini adalah pengembangan sistem informasi terpadu yang telah terintegrasi dengan sistem Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Layanan berbasis aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendataan, pencatatan riwayat pemeriksaan ibu hamil dan anak, serta memberikan wawasan terkait status gizi anak untuk melakukan pencegahan *stunting*.

Guna memberikan dukungan tambahan dalam percepatan pemanfaatan *platform* layanan digital e-Simpat, dengan menggandeng provider telekomunikasi menyediakan perangkat pendukung berupa 300 unit gawai dan 1700 paket layanan data GSM guna menunjang membantu kenyamanan pemenuhan operasional komunikasi para kader Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Sumedang.

Masih di tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga meresmikan *command center* yang merupakan pusat kendali dan monitoring data yang dengan alat-alat penunjang, seperti CCTV dan sensor pendukung lainnya. *Command center* ini mempermudah pemerintah daerah, dalam mengambil keputusan sesuai fakta lapangan lantaran semua data tersedia dan langsung dipantau di *command center*.

Lewat *command center* ini para pengambil keputusan di Kabupaten Sumedang tak perlu berkeliling ke kantor-kantor untuk mencari data demi mengambil keputusan, cukup duduk manis di *command center*. Terlebih *command center* ini memang diperuntukkan untuk integrasi aplikasi. Mulai dari data jumlah pengunjung atau antrian di RSUD, laporan keuangan, kepegawaian, *e-office*, hingga memonitor pelayanan yang belum optimal.

*Command center* ini didukung dengan sebuah panel atau layar besar yang disebut dengan *video wall* 21 kali 4 sebagai *dashboard* aplikasi. Setiap panel layar bisa memuat empat tampilan layar sekaligus yang jika akumulasi bisa mencapai 21 tampilan layar dalam satu panel besar tersebut, juga memungkinkan untuk bisa menyambungkan suara bak *video conference* atau pertemuan secara *online*. Dengan demikian salah satu fungsi *command center* sebagai penyampai informasi dengan cepat terpenuhi.

Kendati pembangunan *command center* ini merupakan bantuan provinsi (banprov) Jawa Barat, pihak Kabupaten Sumedang melakukan pemetaan untuk SDM yang menjadi tenaga ahli dalam pengoperasiannya, mulai dari operator, pembuat aplikasi, petugas pemantau CCTV, petugas penerima pengaduan masyarakat, hingga petugas keamanan yang menjaga 24 jam.

*Command center* yang diresmikan pada Februari 2021 ini diklaim lebih baik dari yang telah dimiliki daerah lain. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi *Sumedang Command Center* dengan menyebutnya sebagai wajah terbaik *Digital West Java* yang di canangkan Pemda Provinsi Jawa Barat.

## 2022 *Transformer Level*

Di fase kedua pada 2022 yang disebut sebagai *Transformer Level*, Pemkab Sumedang menargetkan pada optimalisasi layanan dasar seperti berbagai aplikasi yang telah diluncurkan di tahun-tahun sebelumnya serta peluncuran Satu Data Sumedang dan beberapa program

lainnya. Di fase kedua ini dilakukan soft launching langkah penyesuaian super aplikasi *e-Office* milik Sumedang dengan aplikasi Srikandi yang diluncurkan oleh ANDRI (Arsip Nasional Data Republik Indonesia).

Yang menarik, sebelum ANDRI meluncurkan aplikasi Srikandi, Sumedang sudah terlebih dahulu tata naskah dinas elektronik yaitu *e-Office* . dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap super aplikasi tersebut. Berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemkab Sumedang berupaya agar menu-menu yang tidak ada di aplikasi Srikandi maka diakomodir di aplikasi *e-Office* .

Di waktu yang sama, Pemkab Sumedang juga meluncurkan Program Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang. Satu Data Indonesia ini merupakan program pemerintah dengan tujuan agar berdaulat dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan antara instansi pusat dan instansi daerah. Dengan telah diluncurkannya program itu, maka Pemkab Sumedang menjadi salah satu perintis dalam hal pengimplementasiannya.

Sementara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya masih kesulitan untuk merealisasikan Pepres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, Kabupaten Sumedang memberanikan diri untuk mengimplementasikan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sumedang. Dalam pengimplementasian program Satu Data Indonesia ini dilakukan melalui satu portal yang dibuatnya sendiri sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Portal yang diluncurkan tersebut, berada pada situs [sumedangkab.go.id](http://sumedangkab.go.id) secara open data. Hal itu mengacu kepada Pepres 39 Tahun 2019 agar memenuhi prinsip dari Satu Data itu sendiri. Data yang dibangun oleh Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan standar data yang ditetapkan oleh BPS. Standar tersebut adalah adanya data referensinya, data induknya, meta datanya dan memenuhi untuk diinterkopabilitaskan data dan informasi lain.

Demi penyempurnaan dan menyesuaikan antara data yang dibutuhkan dengan data yang disediakan, Pemkab Sumedang telah bekerja sama dengan camat dan beberapa kepala desa dengan menyebarkan sebuah kuisisioner secara digital mengenai data apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari kuisisioner yang disebar, didapatkan fakta bahwa 99,5 persen masyarakat membutuhkan data di bidang kesehatan, 98,6 persen masyarakat membutuhkan data harga pokok terbaru, 84,1 persen masyarakat membutuhkan data sarana produksi pertanian.

Tak berhenti belajar, Pemkab Sumedang membentuk delegasi benchmarking untuk melakukan rangkaian kunjungan belajar penerapan digital service di Tallin, Estonia. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan Sumedang juga telah menyusun peta jalan transformasi digital seperti yang dilakukan oleh Estonia. Di negara baltik tersebut, Pemkab Sumedang belajar pentingnya penerapan *citizen centric*. Dengan melakukan *shifting* dari '*governing for citizen to governing with citizen*' atau 'berpemerintahan untuk warga ke berpemerintahan bersama warga'. Juga didapatkan fakta bahwa kunci sukses transformasi digital terletak pada kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif dunia usaha, serta kesadaran dan literasi warga. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintahan dan kehidupan warga harus berbasis data (*data driven government and data driven citizen*) walaupun juga ditemukan fakta beberapa layanan digital Sumedang lebih baik dari Estonia, seperti penggunaan WAKEPO.

Terlihat ada 3 hal penting dalam langkah transformasi digital di Estonia. Pertama yaitu membangun lembaga pendidikan di bidang ICT (*the institute of cybernetics*). Kemudian mengembangkan kerja sama pemerintah dengan dunia usaha (*public private partnership*), serta mempersiapkan generasi muda, terutama anak-anak, melalui pendidikan ICT yang masif (*tiger leap*).

Pada tahun 2022 ini pula Pemkab Sumedang mulai menularkan kesuksesannya pada daerah lain. Lewat acara kolaboratif bertajuk *West Java Digital Services International Festival 2022* (WJDS-IFES 2022) Pemkab Sumedang membangun komitmen segenap stakeholder tentang pentingnya *Digital Services Living Lab* sebagai aktualisasi SPBE. Disebutkan ada tiga 'event view' pada WJDS-IFES 2022 yakni *awareness, changing mindset*, serta sinergi dan kolaborasi.

Acara yang diadakan di penghujung 2022 ini dibuka secara resmi oleh Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang. Pada kegiatan ini pula Pemkab Sumedang menegaskan komitmen untuk membagikan platform *Indonesia Digital Services Living Laboratory* kepada 60 kabupaten dan kota di Indonesia, terutama yang telah datang untuk studi banding ke Sumedang. Platform *Indonesia Digital Services Living Lab* merupakan sistem layanan digital bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan standar pelayanan perkotaan cerdas berkelanjutan.

Apa yang dilakukan di tahun 2022 membuahkan hasil yang gemilang, Kabupaten Sumedang meraih nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di antara kabupaten dan kota se-Indonesia pada 2022. Nilai yang diraih Sumedang mencapai 3,84.

Sumedang telah meraih Indeks SPBE tertinggi untuk kedua kali atau yang sebelumnya pada 2020 dengan nilai 3,81. Meski sempat turun di 2021 menjadi 3,52 atau turun sebesar 0,29 poin, Sumedang mampu bangkit dan menduduki kembali peringkat pertama dengan menggeser Kabupaten Bantul dan Banyuwangi yang sebelumnya sebagai terbaik pertama dan kedua.

## 2023 Disruptor Level

Tahun terakhir dari *milestone Sumedang Happy Digital Region* yang di targetkan cita-cita menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai *Happy Digital Region* telah tercapai. Melihat perjalanan sejak tahun 2020, sudah begitu banyak pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten Sumedang. Tahun 2023 Kabupaten Sumedang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari Presiden, MPR, kementerian dan banyak pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo memuji keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam menurunkan angka stunting berbasis platform digital sebagaimana yang disampaikan dalam Rakornas Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi yang diikuti para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Center Bogor, di awal Januari 2023. Menurut presiden *platform* aplikasi yang dimiliki Kabupaten Sumedang sangat penting untuk memonitor penderita *stunting* pada kondisi seperti apa sehingga presiden mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan *platform* teknologi dalam memonitor *stunting*.

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendapat kesempatan mengikuti even *Internasional GovTech Global Forum* di the World Bank Headquarters Washington DC, dengan tema '*Governance in the Digital Era*'. Kepercayaan pihak WorldBank pada Kabupaten Sumedang ini tidak lepas dari capaian terbaiknya dalam penerapan SPBE. World Bank memberikan atensi dan apresiasi, dengan harapan apa yang telah dilakukan oleh Sumedang bisa terapkan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kabupaten Sumedang juga menjadi model dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI setelah kunjungan mereka ke Kabupaten Sumedang untuk mempelajari tranformasi digital yang telah sukses dilakukan daerah ini. Bappenas mempelajari kontribusi apa saja yang telah diberikan oleh Sumedang, terutama terkait SPBE sehingga apa yang dilakukan oleh Pemkab Sumedang patut dijadikan sebagai model oleh Bappenas.

Sebenarnya bukan hanya Bappenas, selama dua tahun terakhir terdapat 105 kabupaten/kota, 3 provinsi, 13 kementerian/lembaga serta 34 lembaga non pemerintah melakukan studi komparatif ke Sumedang. Memang saat ini Kabupaten Sumedang telah menjadi rujukan nasional.

Tak melupakan peran masyarakat dan masih dalam rangka mewujudkan Sumedang Happy Digital Region 2023, Pemkab Sumedang terus berupaya untuk meliterasi digital masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan *training of trainer* Literasi Digital Sekoper Cinta Kabupaten Sumedang Tahun 2023 pada pertengahan Februari 2023.

Kegiatan Literasi Digital ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dppkbp3a). Yang berkolaborasi dengan Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang dan diikuti oleh Alumni Sekoper Cinta dari 6 Kecamatan. Yaitu kecamatan Jatinangor, Sukasari, Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, dan Rancakalong.

Alumni Sekoper Cinta diberikan pelatihan mengenai cara mengakses layanan digital unggulan Sumedang melalui WAKEPO, seperti Bapokting (Bahan Pokok Penting) dan e-Simpaty (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi). Ini dilakukan karena bagaimanapun juga semua layanan digital yang tersedia di wakepo tidak lain hanya untuk kesejahteraan Masyarakat.

Pelatihan ToT juga bagian dari program prioritas menurunkan angka kemiskinan dan stunting pada 2023. Kabupaten Sumedang memiliki prioritas dalam mewujudkan Sumedang Simpaty yakni menurunkan angka kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,14 persen. ini artinya harus turun 1 digit pada 2023.

Sementara untuk angka *stunting* ditargetkan penurunan harus mencapai 2 poin yakni dari 8,27 persen menjadi 6,27 persen. Secara umum langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan cara persuasif *by name by address* dan ini dilakukan dengan memanfaatkan *platform* digital yang ada.

# MILESTONE SUMEDANG HAPPY DIGITAL REGION

Tahapan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mencapai The Ultimate Goals



20  
23

## DISRUPTOR LEVEL

Sumedang Happy Digital Region & Peningkatan Berkelanjutan (Metaverse, NFT, Crypto)

20  
22

## TRANSFORMER LEVEL

Optimasi Layanan Dasar & Sumedang Satu Data (Marketplace, AI, Big, Data)

20  
21

## ENABLER LEVEL

Integrasi Layanan Dasar: SuperApps e-Office, SuperApps e-Office Desa, Tahu Sumedang (G to G, G to B & G to C)

20  
20

## DRIVER LEVEL

e-Office, e-Office Desa, Aplikasi Layanan Dasar, Jaringan Terpusat, Peningkatan Kapasitas Data Center (G to G)

## Smart City Sumedang

*Smart City* Sumedang merupakan penjabaran visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019). Misi keempat Pembangunan Daerah dalam RPJMD Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat dipertajam pada tujuan kedua yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran kedua Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi.

Teknologi Informasi membutuhkan dukungan perangkat keras (hardware) dalam penerapannya dan hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2018–2038 Pasal 18 tentang Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

1. Peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui kabel telepon di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan;
2. Peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui sistem nirkabel meliputi:
  - a. Jaringan seluler *Base Transceiver Station* di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan;
  - b. Daerah yang berbukit dan sulit dijangkau dilakukan dengan sistem nirkabel melalui cakupan Wilayah yang tidak ada jaringan; dan
  - c. Penggunaan menara telekomunikasi bersama (terpadu) dalam rangka efisiensi Ruang.
3. Pengembangan sistem jaringan teknologi informasi. Sebagai pijakan dasar Visi *Smart City* Sumedang senantiasa sejalan dengan visi Sumedang yaitu Sumedang menjadi *Smart City* yang melayani masyarakat dengan data dan informasi yang berkualitas, akurat, terbuka, dan profesional melalui Teknologi Informasi guna mewujudkan masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif. Sedangkan misi *Smart City* Sumedang sebagai berikut:
  - a. Sumedang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui teknologi yang canggih;
  - b. Sumedang mampu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui teknologi informasi guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai;
  - c. Sumedang mampu mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal melalui teknologi informasi wujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata;
  - d. Sumedang mampu menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat melalui teknologi informasi guna terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dan terwujudnya pelayanan publik
  - e. Sumedang mampu mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat menggunakan teknologi informasi guna terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing.



- f. Sehubungan tersebut perlu adanya pedoman pelaksanaan *Smart City* Sumedang. Pedoman tersebut memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan *Smart City* Sumedang yang melibatkan semua stakeholder. Pedoman baru tersebut berupa *Masterplan Smart City Sumedang 2019-2023*. Konsep *Smart City* yang saat ini banyak diterapkan oleh kota-kota dunia memiliki beragam variasi serta fokus yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya sama dalam berbagai dimensi. Setidaknya, ada 6 (enam) dimensi yang dimiliki sebuah kota cerdas, yaitu *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.



# 04 DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL KABUPATEN SUMEDANG

**S**ebelum melakukan transformasi digital. Beberapa pengukuran sistem pemerintah Kabupaten Sumedang masih belum baik dan mencapai target. Seperti rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dengan nilai 2.48. Penilaian pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berada di 48.58. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sumedang mendapat nilai 52. Indeks Sistem MERIT Sumedang mendapat 207. Tingginya stunting sebesar 32.20%, kemudian pada Indeks YANLIK masih belum ada untuk Kabupaten Sumedang.

Selain itu, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumedang tercatat 70,99. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), pengetahuan yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak dicerminkan oleh pengeluaran perkapita. Lebih jauh, dalam Indeks GINI Kabupaten Sumedang mendapatkan nilai 0,42. Hal ini menjadi perhatian bahwa aspek pemerataan menjadi sangat penting setelah aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terlepas dari beberapa indikator penilaian masih rendah, Kabupaten Sumedang memiliki satu desa mandiri.



Indikator penilaian sistem pemerintahan Kabupaten Sumedang masih jauh dari apa yang dicita-citakan, mendorong Bupati Kabupaten Sumedang dan jajaran SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara digital. Akselerasi transformasi digital dilakukan secara masif, dengan tujuan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai pemerintahan terbaik di Jawa Barat.

Transformasi digital yang dilakukan secara bertahap membawa angin segar dengan meningkatkan beberapa indikator penilaian sistem pemerintahan. Pada tahun 2021, Indeks SPBE meningkat bahkan menjadi percontohan daerah lain di Indonesia untuk pelaksanaan SPBE dengan nilai 3,51. Hal ini tentu menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Sumedang

Di samping itu, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat dengan nilai 75.21. Nilai SAKIP tersebut adalah tertinggi ketiga dalam SAKIP Tahun 2021 se-Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Sukabumi di urutan pertama. Prestasi lainnya adalah pada Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sumedang sebesar 63.64 yang artinya naik dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan selanjutnya yaitu Sumedang meraih penghargaan pada Indeks Sistem MERIT dengan nilai 328.5. Kabupaten Sumedang menempati peringkat ke-4 tingkat nasional untuk kategori kabupaten/kota dan urutan pertama untuk kategori kabupaten. Selain itu, Indeks YANLIK didapat 4.56 dengan predikat A. Tidak hanya itu, Indeks Inovasi Daerah saat ini sudah sangat Inovatif yang semula masih kurang inovatif. Inovasi yang dilakukan berpengaruh terhadap turunnya angka stunting sebesar 17.5%, meningkatnya IPM sebesar 71.80%, Indeks GINI berada pada kategori sedang sebesar 0.35% dan semakin banyak desa mandiri menjadi 81 desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Dalam rangka Sumedang menuju pemerintahan yang berkelas. Adapun beberapa target yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang pada tahun 2023. Harapannya bisa mencapai nilai 4 pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Kemudian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 80 dengan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang sebesar 70. Ditargetkan pengukuran Indeks Sistem MERIT mencapai 360. Pencapaian Indeks YANLIK pun di angka 4,80 dengan predikat A. Di samping itu, dalam Indeks Inovasi Daerah ditargetkan dalam kategori terinovatif. Dengan penurunan angka kemiskinan yang semula 10,71% menjadi 8,50%. Menurunnya angka stunting dengan nilai 8%, kemudian meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 74. Indeks GINI berada pada 0.34% dan target menjadi desa mandiri sebanyak 153 desa.

## Kinerja Lingkungan ASN

Inovasi superApps e-Office berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Kinerja di awasi oleh atasan langsung. Setiap kinerja tercatat oleh system dan terdokumentasi dengan baik sehingga memotivasi setiap ASN untuk bekerja lebih baik lagi. Sebagai contoh pimpinan dapat memonitor jumlah surat yang dibuat, diproses bahkan jumlah surat yang selesai ditandatangani oleh setiap ASN. Semua proses itu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke jaringan internet.

Etos kerja ASN mengalami peningkatan karena mulai dari jam masuk sampai jam pulang semua di pantau oleh aplikasi, bukti-bukti kinerja terdokumentasi, dan menjadi variable-variabel untuk penentuan nilai tunjangan kinerja. Dengan di implementasikannya sistem manajemen talenta (salah satu fitur di superApps e-office) penilaian kinerja menjadi faktor penentu pemeringkatan prestasi kinerja setiap ASN sehingga menimbulkan semangat kerja yang lebih baik.

Efisiensi anggaran menjadi lebih baik, beberapa anggaran dapat di pangkas habis sebagai contoh biaya mengantar surat, biaya ATK, *fotocopy* karena surat menyurat tidak lagi menggunakan kertas. Biaya jasa pengembangan aplikasi dan pemeliharaan lebih efisien karena memanfaatkan SDM IT yang berstatus ASN. Pembayaran tunjangan kinerja benar-benar berbasis kinerja, kinerja berkurang pembayaran tunjanganpun berkurang.

## Kebijakan Pemerintah

Dengan implementasi *e-Office* kebijakan publik di Kabupaten Sumedang ikut terdorong untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Kebijakan bekerja dimanapun dan kapanpun, tanda tangan digital, layanan *Bot*, manajemen kinerja dan lain-lain merupakan contoh nyata kebijakan yang lahir karena dorongan inovasi.

SDM di lingkungan pemerintahan ikut terpacu karena inovasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka semua aparatur harus meningkatkan kapasitasnya. Tanpa ikut serta meningkatkan kapasitas lambat laun aparatur tersebut akan semakin tersisih. Penggunaan *smartphone*, mengoperasikan *web browser*, membuat naskah dinas di komputer, dll menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki.

Dengan dukungan kebijakan, SDM yang semakin kompeten, dukungan kuat dari pimpinan pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang baik semuanya telah tersedia dalam inovasi ini.

## Masyarakat

Tingkat kepercayaan publik terhadap para pelayan publiknya atau pemerintahnya menjadi semakin meningkat, karena setiap aktifitas pemerintahan dapat dilihat, diukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat akan semakin sadar bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berbasiskan kebutuhan masyarakat dan setiap kebijakan yang diambil bersumber dari data.

Dukungan dan partisipasi dari masyarakat juga semakin besar dan bangga bahwa pemerintahnya dapat bersaing dengan kota kabupaten lain untuk memberikan pelayanan publik terbaik.

## Prestasi Kabupaten Sumedang 2021

NO.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN/ KATEGORI	PENERIMA	LEADING SECTOR
1.	19/9/2018	PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018 (SINOVIK) DARI MENPAN-RB	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA-REFORMASI BIROKRASI
2.	9/10/2018	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT DARI GUBERNUR JAWA BARAT	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</li> <li>2. BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</li> </ol>
3.	28/10/2018	ANUBHAWA SASANA DESA DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ATAS JASA-JASA BUPATI MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN DESA SUKAJAYA DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI DESA SADAR HUKUM	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</li> <li>2. BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</li> </ol>

4.	7-9/11/2018	PELOPOR KETAHANAN PANGAN PERINGKAT I TERBAIK SE-JAWA BARAT	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT
5.	10-11/12/2018	KABUPATEN TERBAIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SE-JAWA BARAT TAHUN 2018	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG	BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT
6.	13/12/2018	PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN TERBAIK KE-I TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KABUPATEN SUMEDANG	BKKBN PROVINSI JAWA BARAT
7.	14/12/2018	PENINGKATAN LUAS TAMBAH TANAM PERINGKAT KE-III TERBAIK SE-JAWA BARAT UNTUK KOMODITAS PADI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT
8.	19/12/2018	ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT NASIONAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPPA) KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

9.	10/4/2019	PENGHARGAAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI APRESIASI ATAS PARTISIPASI PROGRAM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN SUMEDANG	OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
10.	23/4/2019	PENGELOLA PROGRAM TERBAIK SE-JAWA BARAT UNTUK CAPAIAN PROGRAM SURVEILANS IMUNISASI TAHUN 2018 DARI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
11.	2/5/2019	KABUPATEN/KOTA PALING KREATIF SE-JAWA BARAT DARI GUBERNUR JAWA BARAT	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARBUDPORA) KABUPATEN SUMEDANG	DISPARBUD PROVINSI JAWA BARAT
12.	27/5/2019	MERAJAH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SUMEDANG	BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT

13.	4/7/2019	PAKARTI UTAMA III (PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PKK-KKBPK- KESEHATAN TAHUN 2019)	1. DPPKB KABUPATEN SUMEDANG  2. PKK KABUPATEN SUMEDANG;	BKKBN
14.	11/7/2019	PASTIKA PARAMA	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN KESEHATAN
15.	23/7/2019	KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KATEGORI PRATAMA	DINSOS PPPA KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA)
16.	9/8/2019	PIALA HUMAS JABAR 2019 KATEGORI PENGELOLAAN PENGADUAN PERANGKAT DAERAH SE-JAWA BARAT	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. SUMEDANG (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG)	BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
17.	10- 11/9/2019	ANGGOTA JDIH YANG TELAH TERINTEGRASI DENGAN SISTEM JDIHN ( <a href="http://jdihn.go.id">jdihn.go.id</a> )	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

18.	19/11/2019	<p>OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN 2018, PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA KERJA SAMA DAERAH, DAN LPPD/KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG</p>	<p>BPK DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p>
19.	19/11/2019	<p>SWASTI SABA WISTARA</p>	<p>TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT</p>	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p>
20.	22/11/2019	<p>ANUBHAWA SASANA DESA</p>	<p>BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG</p>	<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI</p>
21.	6/12/2019	<p>MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) LEVEL 3 DAN PENGHARGAAN KAPABILITAS APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) LEVEL 3</p>	<p>INSPEKTORAT</p>	<p>BPKP PROVINSI JAWA BARAT</p>



22.	26/6/2020	OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN 2019	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JAWA BARAT
23.	10/9/2020	PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN "PARITRANA AWARD" KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
24.	3/11/2020	PENGHARGAAN KABUPATEN TERBAIK KE-3 WILAYAH REGIONAL II (WILAYAH TENGAH) PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2020	GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
25.	26/11/2020	KABUPATEN TERBAIK DALAM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT NASIONAL (JIDIH AWARDS 2020)	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

26.	11/12/2020	PIALA ADHIGANA KATEGORI PEJABAT PIMPINAN TIGGI (PPT) PRATAMA TELADAN (INOVASI SAKIP DESA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB
27.	15/12/2020	TERBAIK 10 (TOP TEN) DAN TERBAIK 32 KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KUB) TAHUN 2020	INSPEKTORAT & DPMD	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
28.	18/12/2020	"INNOVATIVE GOVERNMENT PROGRAM OF THE YEAR" PADA MARKETEEER EDITOR'S CHOICE AWARD 2020 (INOVASI SAKIP DESA)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS Inc.
29.	18/12/2020	INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (2020) KATEGORI "SANGAT INOVATIF"	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENDAGRI

30.	22/12/2020	TERBAIK I KATEGORI KABUPATEN DENGAN KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN KE-2 TINGKAT JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
31.	26/1/2021	JUARA UMUM PELAYANAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020 KANREG III BKN AWARDS 2020	BKPSDM KABUPATEN SUMEDANG	KANTOR REGIONAL III BKN
32	26/1/2021	JUARA 1 KATEGORI PELAYANAN STATUS KEPEGAWAIAN KANREG III BKN AWARDS 2020	BKPSDM KABUPATEN SUMEDANG	KANTOR REGIONAL III BKN
33		JUARA 2 KATEGORI PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT KANREG III BKN AWARDS 2020	BKPSDM KABUPATEN SUMEDANG	KANTOR REGIONAL III BKN

34	28/1/2021	TERBAIK PERTAMA PELAKSANAAN SISTEM MERIT TINGKAT NASIONAL UNTUK KATEGORI KABUPATEN PADA ANUGERAH MERITROKASI TAHUN 2020 (INDEKS SISTEM MERIT 201,5)	BKPSDM KABUPATEN SUMEDANG	KOMITE APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)
35.	9/2/2021	ANUGERAH KEBUDAYAAN PWI PUSAT TAHUN 2021	BUPATI SUMEDANG	PWI PUSAT
36.	26/2/2021	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERBAIK PERTAMA TINGKAT NASIONAL UNTUK KATEGORI KABUPATEN/KOTA (INDEKS SPBE 3,81)	DINAS KOMINFOSANDITIK	MENTERI PANRB RI
37.	3/3/2021	KARYA BHAKTI PEDULI SATPOL PP	SATPOL PP KABUPATEN SUMEDANG	MENTERI DALAM NEGERI RI
38.	31/3/2021	INDONESIA VISIONARY LEADER SEASON VII (KATEGORI THE BEST OVERALL)	BUPATI SUMEDANG	MNC PORTAL INDONESIA (KORAN SINDO, SINDONEWS, OKEZONE, INEWS)

39.	22/4/2021	SAKIP RB AWARD TAHUN 2020  (SAKIP BB =71,58/B GEMUK DAN RB BAIK/B)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	MENTERI PANRB RI
40.	19/5/2021	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN 2020	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN JAWA BARAT
41.	29/7/2021	KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KATEGORI MADYA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN P3A RI
42.	10/9/2021	TOP BUMD AWARD 2021 KATEGORI BPR BINTANG 5	BANK SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA
43.	10/9/2021	TOP BUMD AWARD 2021  KATEGORI TOP PEMBINA	BUPATI SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA
44.	10/9/2021	TOP BUMD AWARD 2021 KATEGORI TOP CEO	DIREKTUR BANK SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA
45.	20/9/2021	JUARA I GELAR TEKNOLOGI	KETUA POSYANTEK DESA GUDANG KEC.	KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN

		TEPAT GUNA (TTG) NASIONAL XXII  KATEGORI POSYANTEK DESA BERPRESTASI	TANJUNGSARI  (DIKDIK TASDIK)	TRANSMIGRASI RI
46.	17/11/2021	SWASTI SABA WIWERDA TAHUN 2021	TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT	KEMENTERIAN KESEHATAN RI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
47.	25/11/2021	JUARA 2 NASIONAL PENGHARGAAN INOVASI CEGAH STUNTING KATEGORI PENGGUNAAN TEKNOLOGI (INOVASI I-SIMPATI)	KEPALA BAPPPEDA SUMEDANG	BKKBN, ASOSIASI DINAS KESEHATAN SELURUH INDONESIA, HABIBIE INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE
48.	2/12/2021	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) AWARD 2021  TERBAIK KE-4 KATEGORI KABUPATEN	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DAN KEMENKUMHAM RI
49.	2/12/2021	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) AWARD 2021 TERBAIK KE-2 KATEGORI SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DAN KEMENKUMHAM RI

50.	7/12/2021	KATEGORI "SANGAT BAIK" DALAM PENERAPAN SISTEM MERIT MANAJEMEN ASN	BKPSDM KABUPATEN SUMEDANG	KOMITE APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)
51.	7/12/2021	JUARA I KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KJIB) 2021 (APLIKASI E-OFFICE)	SEKRETARIAT DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
52.	7/12/2021	TOP 16 ABDI BHAKTI TANI KJIB 2021	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN JATIGEDE	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
53.	7/12/2021	TOP 23 KJIB (APLIKASI SIPEDO)	KEPALA BLK DISNAKERTRANS	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
54.	9/12/2021	NATAMUKTI AWARD 2021 KATEGORI NATAMUKTI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN KUKM DAN INDONESIA COUNCIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB)



55.	14/12/2021	ANUGERAH TOKOH JAWA BARAT TAHUN 2021	BUPATI SUMEDANG	IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) JAWA BARAT
56.	21/12/2021	KATEGORI GOVERNMENT AWARD BERUPA SANDIKAMIMANIA PENGHARGAAN (FESTIVAL LITERASI DIGITAL JAWA BARAT 2021)	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
57.	21/12/2021	KATEGORI GOVERNMENT AWARD DESA DIGITAL TERBAIK (FESTIVAL LITERASI DIGITAL JAWA BARAT 2021)	DESA SUKAMANTRI KECAMATAN TANJUNGPURA	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
58.	21/12/2021	KATEGORI TOKOH PEDULI LITERASI DIGITAL (FESTIVAL LITERASI DIGITAL JAWA BARAT 2021)	BUPATI SUMEDANG	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT

59.	22/12/2021	BEST PRACTICE DAN PESERTA TERBAIK SEKOPER CINTA	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	PEMDA PROVINSI JAWA BARAT
60.	22/12/2021	TERBAIK I KATEGORI KABUPATEN/KOTA DALAM KINERJA PELAKSANAAN DELAPAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT JAWA BARAT	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	PEMDA PROVINSI JAWA BARAT
61.	22/12/2021	KATEGORI KABUPATEN/KOTA PALING REPLIKATIF PELAKSANAAN DELAPAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING.	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	PEMDA PROVINSI JAWA BARAT
62.	29/12/2021	INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2020 KATEGORI SANGAT INOVATIF	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	KEMENDAGRI

63.	12/1/2022	PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 KATEGORI INOVATIF KABUPATEN/KOTA	KEPALA UPTD BLK PADA DISNAKERTRANS	BKD PROVINSI JAWA BARAT
64.	12/1/2022	PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 KATEGORI FUTURE LEADER KABUPATEN/KOTA	KASUBBAG PUBLIKASI PADA BAGIAN HUMAS PROTOKOL SETDA	BKD PROVINSI JAWA BARAT
65.	13/1/2022	TERBAIK KE-4 NASIONAL DAN TERBAIK PERTAMA DI JAWA BARAT DALAM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN 2021	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG	BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL
66.	17/1/2022	KEPALA DAERAH PENDUKUNG GERAKAN CINTA ZAKAT PADA BAZNAS AWARD 2022	BUPATI SUMEDANG	BAZNAS RI

67.	8/3/2022	PENGHARGAAN PEMBINA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK 2021 (PELAYANAN PRIMA)	BUPATI SUMEDANG	KEMENPAN RB
68.	8/3/2022	PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK 2021 (PELAYANAN PRIMA)	DISDUKCAPIL	KEMENPAN RB
69.	8/3/2022	PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK 2021 (PELAYANAN PRIMA)	DPMPSTP	KEMENPAN RB
70.	30/3/2022	PERINGKAT PERTAMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (TERBAIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
71.	20/4/2022	TOP BUMD AWARD 2022 KATEGORI BPR BINTANG 5	BANK SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA

72.	20/4/2022	TOP BUMD AWARD 2022 KATEGORI TOP PEMBINA BPR	BUPATI SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA
73.	20/4/2022	TOP BUMD AWARD 2022 KATEGORI TOP CEO	DIREKTUR UTAMA PERUMDA BANK SUMEDANG	MAJALAH TOP BUSINESS, INSTITUT OTONOMI DAERAH, DAN LEMBAGA KAJIAN NAWACITA
74.	28/4/2022	TERBAIK KEDUA NASIONAL PERENCANAAN PENCAPAIAN INOVASI PEMBANGUNAN PADA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2022	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
75.	20/5/2022	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN 2021	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN JAWA BARAT
76.	16/6/2022	30 TERBAIK KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH UMUM PADA KOMPETISI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (LAPOR SP4IN)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG (DISKOMINFOSANDITIK)	KEMENPAN RB, KEMENDAGRI, KEMENKOMINFO, KANTOR STAF PRESIDEN, OMBUDSMAN RI

77.	25/6/2022	JUARA KE-6 MTQ KE-37 JAWA BARAT	KAFILAH MTQ KABUPATEN SUMEDANG	LPTQ JAWA BARAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
78.	22/7/2022	KABUPATEN LAYAK ANAK KATEGORI MADYA	KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN P3A
79.	25/8/2022	PUBLIC SERVICE OF THE YEAR 2022 JABAR BANTEN UNTUK APLIKASI SIPEDO (INFORMASI PELATIHAN BERBASIS DATABASE ONLINE)	DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS, INC AND MARKETEERS
80.	25/8/2022	PUBLIC SERVICE OF THE YEAR 2022 JABAR BANTEN UNTUK APLIKASI TONGSIS (TEROPONG OPERASIONAL PSC SIMPATIK II9)	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS, INC AND MARKETEERS
81.	25/8/2022	PUBLIC SERVICE OF THE YEAR 2022 JABAR BANTEN UNTUK APLIKASI SI LCE MANDIRI (SISTEM IZIN CETAK MANDIRI)	DPMPTSP KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS, INC AND MARKETEERS
82.	30/8/2022	KABUPATEN KOTA TERBAIK PERINGKAT 1 KINERJA DELAPAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 TINGKAT JAWA BARAT	TIM KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN SUMEDANG	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

83.	29/9/2022	PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TERBAIK KE-2 TINGKAT NASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
84.	5/10/2022	THE BEST GOAL OF POINT INVESTMENT PADA WEST JAVA INVESTMENT SUMMIT 2022 (SPBE TERBAIK, PENERBIT NIB TERBANYAK DI JAWA BARAT)	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	BANK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
85.	8/10/2022	UNIT SABER HOAX DAERAH TERAKTIF PADA FESTIVAL LITERASI DIGITAL (VIRAL) 2022	SUMEDANG SABER HOAX	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
86.	8/10/2022	PENERAPAN TTE TERBAIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KATEGORI PENERBITAN TTE TERBANYAK PADA SANDIKAMI AWARD PADA FESTIVAL LITERASI DIGITAL (VIRAL) 2022	DISKOMINFOSANDITI K	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
87.	8/10/2022	KOMITMEN PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI TERBAIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISKOMINFOSANDITI K	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT

		PADA SANDIKAMI AWARD TAHUN 2022 PADA FESTIVAL LITERASI DIGITAL (VIRAL) 2022		
88.	8/10/2022	TERBAIK KEDUA PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL TINGKAT DESA DI JAWA BARAT PADA FESTIVAL LITERASI DIGITAL (VIRAL) 2022	DESA CINANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
89.	8/10/2022	TERBAIK KETIGA PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL TINGKAT DESA DI JAWA BARAT PADA FESTIVAL LITERASI DIGITAL (VIRAL) 2022	DESA SUKATALI KECAMATAN SITURAJA	DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT
90.	11/10/2022	JUARA HARAPAN II LOMBA SINERGITAS KINERJA KECAMATAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022	KECAMATAN CIMALAKA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
91.	11/10/2022	BUNDA PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 KATEGORI WIYATA DHARMA PRATAMA	BUNDA PAUD KABUPATEN SUMEDANG	MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
92.	18/10/2022	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)	PEMDA KABUPATEN SUMEDANG (BAGIAN HUKUM SETDA)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DAN



		AWARD 2022  TERBAIK KE-9 KATEGORI KABUPATEN		KEMENKUMHAM RI
93.	18/10/2022	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JIDIHN) AWARD 2022  TERBAIK KE- KATEGORI SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DAN KEMENKUMHAM RI
94.	28/10/2022 2	JUARA TERBAIK PERTAMA SATU DATA JABAR AWARDS TAHUN 2022  KATEGORI PENYELENGGARA TATA KELOLA SATU DATA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN BADAN PUSAT STATISTIK JABAR
95.	24/11/2022	BHUMANDALA NAMA RUPABUMI KATEGORI PEMERINTAH DAERAH	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
96.	24/11/2022	TERBAIK KE-1 ANUGERAH MEDIA HUMAS 2022 KATEGORI MEDIA SOSIAL	DINAS KOMINFOSANDITIK KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN KOMINFO RI

97.	25/11/2022	TERBAIK KE-2 ANUGERAH MEDIA HUMAS 2022 KATEGORI MEDIA AUDIO VISUAL	DINAS KOMINFOSANDITIK KABUPATEN SUMEDANG	KEMENTERIAN KOMINFO RI
98.	29/11/2022	TERBAIK KE-3 PNS INSPIRATIF  ANUGERAH ASN BERPRESTASI JAWA BARAT KATEGORI	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG (AGUS WAHIDIN)	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
99.	29/11/2022	TERBAIK KE-3 PNS INSPIRATIF  ANUGERAH ASN BERPRESTASI JAWA BARAT KATEGORI	KABID INFORMASI PADA DINAS KOMINFOSANDITIK KABUPATEN SUMEDANG (ARIF SYAMSUDDIN)	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
100	5/12/2022	PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KE-15 TINGKAT NASIONAL DAN KE-1 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI DISDUKCAPIL DENGAN INDEKS 4,59 (KATEGORI A)	DISDUKCAPIL KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB RI
101	5/12/2022	PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KE-14 TINGKAT NASIONAL KATEGORI DPMPSTP DENGAN INDEKS 4,66 (KATEGORI A)	DPMPSTP/MPP KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB RI
102	6/12/2022	ANUGERAH BERSAMA PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI NILAI SAKIP = BB DAN NILAI RB = BB	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB RI

103	6/12/2022	ANUGERAH BERSAMA PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI  UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI "PELAYANAN PRIMA"	DISDUKCAPIL KABUPATEN SUMEDANG	KEMENPAN RB
104	8/12/2022	PERINGKAT SILVER PADA REGIONAL ENTREPRENEUR AWARD 2022 UNTUK KATEGORI INOVASI PEMBERDAYAAN UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	MARKPLUS Inc.
105	8/12/2022	ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP AWARD) JAWA BARAT TAHUN 2022 KATEGORI INFORMATIF	DINAS KOMINFOSANDITIK (PPID UTAMA KABUPATEN SUMEDANG)	KOMISI INFORMASI JAWA BARAT
106	14/12/2022	TERBAIK PERTAMA KABUPATEN/KOTA DENGAN KINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

107	15/12/2022	BAZNAS AWARD JABAR 2022  KATEGORI KEPALA DAERAH PEDULI BAZNAS	BUPATI SUMEDANG	BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT
108	21/12/2022	JUARA 1 KATEGORI INOVASI KABUPATEN DENGAN INOVASI APLIKASI PENURUNAN STUNTING "SIMPATI" PADA KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KJJB) 2022	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
109	21/12/2022	JUARA KATEGORI INSTANSI PENGUSUL INOVASI TERBANYAK PADA KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KJJB) 2022 (TOTAL INOVASI YANG DIUSULKAN 71 INOVASI DAN LOLOS SELEKSI SEBANYAK 61 INOVASI).	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
110	21/12/2022	TOP 45 DENGAN INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAFTAR DI TEMPAT (SIPAJAKDADI) PADA KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KJJB) 2022	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

111	23/12/2022	INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2022 KATEGORI "SANGAT INOVATIF"	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENDAGRI
112	31/01/2023	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERBAIK PERTAMA TINGKAT NASIONAL UNTUK KATEGORI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 (INDEKS SPBE 3,84)	DINAS KOMINFOSANDITIK	MENTERI PANRB RI
113	31/01/2023	CAPAIAN 100% TRANSFORMASI PENGELOLA DANA BERGULIR EKS PNPM-MPd MENJADI BUMN BERSAMA Ikad DI KABUPATEN SUMEDANG	BUPATI SUMEDANG	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
114	28/2/2023	TERBAIK PERTAMA DIGITAL LEADERSHIP GOVERNMENT AWARD 2022 KATEGORI <i>LEADING CHANGE AND INFLUENCE</i>	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	KEMENDAGRI RI DAN ASOSIASI DISKOMINFO PROVINSI SELURUH INDONESIA (ASKOMPSI)
115	28/2/2023	TOP 5 PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KATEGORI KEPATUHAN TINGGI (HIJAU)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	OMBUDSMAN RI

116	28/2/2023	TERBAIK KE-1 IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN SE- JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
117	11/4/2023	BADAN PUBLIK DENGAN PREDIKAT "INFORMATIF"  PADA PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KOMISI INFORMASI TAHUN 2022	PPID KABUPATEN SUMEDANG (DISKOMINFOSANDITI K) KABUPATEN SUMEDANG	KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
118	29/4/2023	PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA  PERINGKAT KEDUA TERTINGGI NASIONAL BERDASARKAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN 2022	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	MENTERI DALAM NEGERI RI
119	3/5/2023	ANUGERAH LPPL (LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL) TAHUN 2023  KATEGORI BUPATI PEDULI LPPL RADIO MEDIA INFORMASI	BUPATI SUMEDANG	ASOSIASI LPPL RADIO TELEVISI INDONESIA

120	9/5/2023	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT
121	16/5/2023	LENCANA BAKTI TRANSMIGRASI	BUPATI SUMEDANG	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
122	17/5/2023	UPAKARTI ARTHESWARA TINARBUKA  (JUARA PERTAMA ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI KATEGORI BUPATI)	BUPATI SUMEDANG	KOMISI INFORMASI PUSAT & MENKOPOLHUKAM RI

## 05 PENUTUP

Dalam percepatan pelaksanaan transformasi digital, Kabupaten Sumedang menjelma sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Barat dan Indonesia dalam banyak hal diantaranya memiliki indeks terbaik dalam implementasi SPBE, memiliki *command center*, memiliki berbagai aplikasi digital untuk memudahkan dan meningkatkan pendidikan atau pelayanan publik kepada seluruh masyarakat, penanganan kemiskinan, *stunting*, SAKIP Desa, Ma Uneh WAKepo,, dan aplikasi lainnya.

Teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan selalu memanfaatkan keberadaan digital atau teknologi. Kini, Kabupaten Sumedang bersiap untuk menuju pemerintahan yang berkelas.

Pencapaian dalam inovasi, terobosan, upaya reformasi dan birokrasi membawa Kabupaten Sumedang dalam perubahan-perubahan yang positif dan dapat memberikan inspirasi untuk kolaborasi dan dukungan yang lebih kuat guna menghadapi tantangan global dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan aksi lokal. Selain itu, harapannya dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dalam membangun sistem yang baik untuk mengakomodasi harapan masyarakat dengan mendorong kinerja bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.



## DIGITAL SERVICES LIVING LAB: DARI SUMEDANG UNTUK JABAR, DARI JABAR UNTUK INDONESIA



Akhirnya Visi Indonesia menjadikan segala sesuatu serba digital (Visi Indonesia 2045 dan 2020 *Go Digital Vision*) sudah di depan mata.

Perjalanan digitalisasi Indonesia tersebut didukung oleh berbagai rintisan bidang digital dalam sistem pemerintahan. Salah satunya muncul di Kabupaten Sumedang yang telah melahirkan sebuah inovasi untuk melompatkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) berupa *platform* digital bernama *Indonesia Services Living Lab*.

Platform tersebut menjadi topik utama dalam even *West Java Digital Services International Festival 2022*, Kamis (22/12), di Balairung Jenderal Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Luhut mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan Bupati Sumedang saat ini yang dinilai sudah memanfaatkan digitalisasi dengan sangat baik.

## BUPATI SUMEDANG DONY AHMAD MUNIR PIMPIN ROMBONGAN MENGUNJUNGI KOTA TALLINN ESTONIA



Kesempatan pertama mendapatkan pencerahan seputar bagaimana Estonia memulai transformasi digital (*The Beginning of e-Estonia*) yang disampaikan oleh Carmen Raal, *Digital Transformation Advisor e-Estonia*.

Transformasi digital di Estonia dimulai dengan tiga hal penting, yaitu membangun lembaga pendidikan di bidang ICT (*The Institute of Cybernetics*), mengembangkan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha (*public private partnership*), serta mempersiapkan generasi muda, terutama anak-anak, melalui pendidikan ICT yang masif (*tiger leap*).

Sumedang memiliki grand design dan roadmap yang sejalan dengan apa yang telah dilakukan Estonia. Bahkan untuk beberapa usecase, Sumedang lebih baik dari Estonia. Misal, penggunaan WAKEPO (WA Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online). Tinggal penguatan literasi digital warga, interoperabilitas data, dan konsistensi kepemimpinan yang kuat dalam implementasi transformasi digital.

# LAMPIRAN

---

## Lampiran I

### Tahapan Inisiatif Transformasi Digital Kabupaten Sumedang

Fase	Kode	Inisiatif Transformasi Digital di Indonesia	Inovasi
<b>Fase 1</b>  <b>Fondasi Digital</b>  Membangun pondasi transformasi digital yang kokoh	SI1-1 (Infrastruktur)	Menjadikan Infrastruktur Digital sebagai Project Strategis	<i>Fiber Optic</i> ke seluruh desa/kel (277 desa/kel)
	SI1-2	Membangun konektivitas yang andal	131 titik di 26 kec - wifi gratis
	SD1-1(Data)	Membangun fondasi <i>Data-Driven</i>	<i>Command Center, mini command center</i>
	SD1-2	Menciptakan Kepemimpinan Data yang baik	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)
	SD1-3	Menciptakan Lingkungan Keterbukaan Data yang Modern	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)
	SD1-4	Merangkul Pegawai, Komunitas, dan Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Data	Relawan TIK, Komunitas TIK
	STD1-1 (Talenta Digital)	Memahami dan meningkatkan kemampuan digital	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)
	STD1-2	Membangun fondasi keterampilan untuk kemampuan yang lebih baik	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)
	STKD1-1 (Tata Kelola Digital)	Mendorong <i>Orchestrator Digital</i>	<i>Bootcamp, transfer knowledge &amp; kepemimpinan TI</i>
	STKD1-2	Sinergi, Koordinasi dan Kolaborasi	Wantiknas, Akademisi, Komunitas
	STKD1-3	Meningkatkan standar dan praktek digital	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)

	STKD1-4	Menciptakan strategi dan kebijakan Keamanan Siber	Pembentukan ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> ) CSIRT Sumedang
	STKD1-5	Membangun Kepemimpinan Keamanan Digital	Monev Kemanan Informasi ke desa-desa & OPD
	STKD1-6	Memastikan aturan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuannya	KAK diperiksa Diskominfo
	STKD1-7	Akselerasi digitalisasi Sektor Publik	Aplikasi publik (Tahu Sumedang)
	STKD1-8	Membangun interoperabilitas sistem	JDIH Sumedang
<b>Fase 2</b>  <b>Akelerasi Digital</b>  Mempercepat layanan publik berbasis digital	SI2-1	Meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan dengan harga layanan yang terjangkau	Fiber Optic ke seluruh desa/kel (277 desa/kel). Wifi gratis
	SD2-1	Memfaatkan Data untuk Layanan yang Lebih Baik	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)
	SD2-2	Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Data	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)
	SD2-3	Meningkatkan adopsi dan layanan digital	layanan via whatsapp bot (WA KEPO)
	SD2-4	Memastikan kolaborasi interaksi digital	
	STD2-1	Mendorong penguatan sertifikasi kompetensi	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)
	STD2-2	Mempersiapkan sumber daya kompetitif	<i>Bootcamp, transfer knowledge &amp; kepemimpinan TI</i>
	STKD2-1	Memprioritaskan investastasi untuk optimasi digital yang berkelanjutan	
	STKD2-2	Mendorong penyelesaian masalah secara inovatif	Satu bidang satu inovasi, aplikasi kompilasi inovasi
	STKD3-2	Menyeimbangkan Keamanan, Privasi, dan Inovasi	Indeks KAMI

<p>Fase 3</p> <p><b>Inovasi Digital</b></p> <p>Digitalisasi tindak lanjut untuk peningkatan pertumbuhan</p>	SI3-1	Mendorong penggunaan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas ekonomi	Portal UMKM: umkm.sumedangkab.go.id
	SD3-1	Fokus Pada Data Analitik	Teknologi power BI
	SD3-2	Meningkatkan kualitas keamanan informasi dan manajemen risiko	Indeks KAMI
	STD3-1	Mendukung konektivitas yang lebih luas untuk tujuan dan komunitas tertentu	<i>Fiber Optic</i> ke seluruh desa/kel (277 desa/kel). Wifi gratis
	STKD3-1	Menumbuhkan Ekosistem Inovasi dan Mendukung Potensi Lokal	Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas
	STKD3-2	Mempercepat investasi untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi	
	STKD3-3	Digitalisasi sektor secara merata	
<p>Fase 4</p> <p><b>Optimalisasi Digital</b></p> <p>Optimalisasi transformasi untuk keberlanjutan layanan yang bernilai</p>	SI4-1	Optimalisasi Ketersediaan jaringan melalui Kolaborasi Multistakeholder	Pusat, Opsel, Microsoft, dll
	SD4-1	Memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau	e-office, MAIJAH, MARKONAH, AMARI, WA KEPO, MAUNEH
	STD4-1	Berinvestasi untuk tenaga kerja yang siap dimasa depan	Pelatihan teknologi
	STKD4-1	Mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan transformasi digital	Satu dinas wajib 4 inovasi
	STKD4-2	Mempertahankan intensi kebijakan dan legislasi keamanan digital	Indeks KAMI, Pembentukan ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> ) CSIRT Sumedang
	STKD4-3	Menjaga keselarasan tujuan transformasi digital	

## Lampiran II

### Dampak Transformasi Digital



#### Sebelum Melakukan Transformasi

- ✓ Aplikasi Si Ice Mandiri 1.0 tahun 2018 (27,44)
- ✓ Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) tahun 2021 sebanyak 1.571
- ✓ Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun 2019: B (77,4), tahun 2020: BB (77,94)
- ✓ Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2020: 85,86
- ✓ Nilai Investasi tahun 2020: 1,18 T
- ✓ Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Perizinan tahun 2020: 91, 2021: 93



#### Sesudah Melakukan Transformasi

- ✓ Aplikasi Si Ice Mandiri 1.1 tahun 2020 (93,43)
- ✓ Progres penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) tahun 2022 mencapai 34.445
- ✓ Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun 2021: A (83,72)
- ✓ Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2021: 86,09
- ✓ Nilai Investasi tahun 2021: 4,2 T
- ✓ Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Perizinan tahun 2022: 96 (TW II)

## SMART GOVERNANCE SUMEDANG

Sasaran	Inisiatif
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan adanya:	Penyederhanaan alur penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem yang terintegrasi;
	Peningkatan keterbukaan informasi publik;
	Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.
Terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan adanya :	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
	Peningkatan penggunaan sistem informasi yang user friendly dengan security system yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
	Peningkatan tata kelola birokrasi yang adaptif-inovatif terhadap perkembangan dan kondisi lingkungan serta kebutuhan publik.
Terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah, yang ditandai dengan adanya :	Peningkatan pelayanan publik yang transparan dan terukur;
	Penerapan pelayanan publik yang cepat, nyata, dan nyaman serta <i>zero complain</i> dari masyarakat; dan
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## SMART BRANDING SUMEDANG

Sasaran	Inisiatif
Mengembangkan Pariwisata dengan nilai Kearifan Lokal dan Budaya berbasis Teknologi Informasi	Merancang dan menetapkan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) yang dituangkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)
	Menetapkan ikon pariwisata (kegiatan tahunan berskala internasional, tempat bersejarah, membangun artifak yang menjadi landmark) daerah melibatkan seluruh stakeholder pariwisata daerah
	Mengangkat penjenamaan/branding Sumedang Puser Budaya Sunda



	<p>Membangun replika Keraton Kerajaan Sumedang sebagai akar kearifan lokal dan budaya Sumedang</p> <p>Melakukan sosialisasi dalam menumbuhkan kembali rasa cinta budaya dan sejarah dengan peran teknologi informasi</p> <p>Atraksi wisata budaya, sejarah, alam, dan buatan dijadikan sebagai sarana edukasi warga dan wisatawan</p> <p>Mengangkat atraksi wisata festival dan event budaya yang belum tergali dan dieksekusi dengan baik</p> <p>Mengembangkan Bus Tampomas sebagai transportasi khusus wisata</p> <p>Mengembangkan sarana akomodasi khas Sumedang melalui pengembangan desa wisata</p> <p>Penerapan <i>e-government (super apps)</i> dalam pembangunan pariwisata yang bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi resmi</p>
<p>Mengembangkan model bisnis daerah yang berciri khas Sumedang</p>	<p>Mengembangkan model bisnis daerah yang berciri khas Sumedang</p> <p>Pengembangan ubi madu cilembu dan menciptakan kreasi kuliner baru sebagai ikon kuliner khas sumedang</p> <p>Membangun sentra kuliner dan belanja bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru (penggerak ekonomi)</p> <p>Melakukan identifikasi bisnis aplikasi lokal dan menyalurkan dalam wadah komunitas yang dilibatkan dalam pembangunan Sumedang</p>
<p>Mengembangkan Wajah Kota (Landmark) sebagai ikon Sumedang</p>	<p>Melakukan Revitalisasi Wajah Kota yang ditetapkan sebagai ikon Sumedang meliputi fasilitas parkir, jalur pedestrian, dan penghijauan</p> <p>Memperkuat citra Sumedang di dunia maya &amp; media sosial melalui wajah kota</p>

## SMART ECONOMY SUMEDANG

Sasaran	Inisiatif
Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)	<p>Peningkatan Daya Saing Produk Lokal. Program pelatihan peningkatan kualitas produk lokal, kekhasan produk, penguatan branding produk, pemasaran produk, packaging produk, distribusi produk dan kanal digital ecommerce</p> <p>Pengembangan <i>home-brand</i> yang kuat untuk industri jasa dan produk lokal</p> <p>Pembangunan Sentra Produk Unggulan. Pengembangan sentra industri lokal unggulan, penyediaan galeri dan pemasaran untuk produk lokal, penyediaan <i>platform</i> digital produk lokal unggulan</p> <p>Integrasi RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah). Program pengembangan industri jasa berupa pendidikan, wisata alam, wisata olahraga, wisata sejarah, wisata seni dan budaya, wisata kuliner dan belanja (paket wisata UMKM)</p> <p>Pengembangan Hub Industri Unggulan. Program sinergi wisata dengan wisata belanja yang memanfaatkan sektor-sektor unggulan</p> <p>Kemudahan izin usaha startup, pengembangan dan pendampingan usaha berbasis industri rumah tangga dan mikro-kecil</p> <p>Pengembangan dan proteksi industri primer unggulan. Pengelolaan distribusi hasil produk industri primer yang lebih baik</p> <p>Kebijakan pemda untuk peruntukan lahan industri primer, sekunder dan tersier</p> <p>Supremasi hukum pemberantasan jaringan preman dan kepastian usaha</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai infrastruktur pendorong sektor ekonomi melalui pengembangan platform website, aplikasi dan jaringan</p> <p>Kebijakan dan paket ekonomi serta kemudahan bagi investor</p> <p>Program dan proyek lintas koordinasi antar bagian</p>
Meningkatkan kesejahteraan rakyat (welfare)	<p>Penciptaan lapangan kerja bagi talent lokal</p> <p>Pengembangan program swadaya, swakelola, swakonsumsi produk lokal</p>

	Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
	Pembangunan pasar tani unggulan
	Pembangunan infrastruktur dan akses ke lokasi wisata unggulan
	Mengoptimalkan fasilitas pembelajaran dan peningkatan keahlian bagi penduduk usia potensial
	Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi untuk mendukung industri primer
	Pengembangan skill SDM dengan menambah balai pelatihan, komunitas, dukungan dari perguruan tinggi. Peningkatan program Balai Latihan Kerja (BLK) untuk literasi digital, <i>e-commerce dan job skills</i> sesuai industri yang ditargetkan pemda. Kerjasama industri dan
	perguruan tinggi untuk <i>community development</i> , kewirausahaan dan pelatihan literasi digital
Pengembangan ekonomi transaksi keuangan (transaction)	Bantuan permodalan
	Penyediaan fasilitas dan ekosistem <i>less-cash society</i>

## SMART LIVING SUMEDANG

Sasaran	Inisiatif
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony):	Pemukiman yang terintegrasi dengan fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, olahraga, pasar),
	Mewujudkan pembangunan pemukiman dengan berbasis ekologi melalui pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau,
	Mewujudkan kawasan permukiman sehat dengan membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),
	Penambahan panjang jalan dan perawatan jalan yang baik dengan meniadakan jalan yang rusak serta membatasi pergerakan maupun pengawasan truk-truk angkutan yang melalui jalan-jalan di dalam Kabupaten Sumedang

Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*):

Mewujudkan sanitasi yang sehat

Mewujudkan pengawasan kualitas makanan anak-anak khususnya pada sekolah-sekolah serta mutu penjaja disekitarnya,

Mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan (puskesmas, klinik, RS, lab, apotek) dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi melalui *e-health* dan penggunaan alat kesehatan berbasis *internet of things*, mempermudah pembiayaan kesehatan dengan akses melalui pemberian bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jaminan Kesehatan Daerah (JKD).

Akses terhadap rumah sehat melalui penerapan Rumah Layak Huni berbasiskan *Smart Home*.

Menjamin ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*):

Menjamin kemudahan dan kenyamanan berlalu lintas (termasuk disable, pejalan kaki, *unmotorized*),

Mewujudkan sarana lalu lintas yang terjangkau dan dapat diandalkan (sarana transportasi massal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan),

Mewujudkan sarana pengaturan lalu-lintas truk-truk angkutan batu/ pasir dll. yang melalui jalan-jalan di Kabupaten, demi terciptanya keselamatan pengguna jalan serta kualitas jalan yang baik tetap terpelihara, sehingga akses ke lokasi pariwisata menjadi nyaman dengan adanya akses jalan yg baik.

## SMART SOCIETY SUMEDANG

### Sasaran

Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*Community*)

### Inisiatif

Sosialisasi kegiatan oleh pemerintah daerah sebaiknya dilakukan secara intensif kepada dinas terkait sebelum ke masyarakat

Menyiapkan sarana fisik bagi masyarakat untuk berinteraksi membangun hubungan yang bersifat informal

Melakukan identifikasi komunitas-komunitas warga yang bisa dijadikan sebagai agen perubahan di masyarakat

Mekanisme kontrol dari setiap adanya program perlu dibuat dan diperjelas

Menghidupkan budaya melalui aktivitas event yang bersifat lokal untuk menjaga budaya dari gerusan teknologi (sebagai contoh upacara Tarawangsa)

<p>Membangun ekosistem belajar yang efisien (Learning)</p>	<p>Pembangunan ruang terbuka untuk literasi digital sehingga interaksi bisa terjadi untuk membangun mindset digital warga Sumedang</p> <p>Orang tua harus “sekolah” kembali terkait dengan perubahan zaman</p> <p>Membuat kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan lagi budaya-budaya khas Sumedang seperti Rebo Sunda yang tidak hanya seminggu sekali, budaya sopan santun yang bisa dimunculkan kembali melalui aktivitas bersama</p>
<p>Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan masyarakat (Security)</p>	<p>CCTV untuk menjamin ketenangan warga perlu diperbanyak.</p> <p>Siskamling mulai pudar sehingga perlu dikembalikan lagi seperti dahulu</p> <p>Pemasangan sensor atau chip pada kendaraan bermotor untuk mengantisipasi terjadinya pencurian</p> <p>Hal yang sangat basic, banyaknya jalan yang bolong sehingga sering membahayakan pengguna jalan</p> <p>Perlu membuat antisipasi kejahatan yang bersifat online seperti akses data ataupun uang <i>cashless</i> yang bisa saja dicuri dan sebagainya</p>
<p><b>SMART ENVIRONMENT SUMEDANG</b></p>	
<p><b>Sasaran</b></p>	<p><b>Inisiatif</b></p>
<p>Mengembangkan program perlindungan lingkungan hidup (<i>protection</i>)</p>	<p>Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara</p> <p>Penggunaan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, udara, misalnya dengan pemakaian sensor, pengambilan sampel uji, dsb.</p> <p>Penambahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>Pemantauan, pengendalian dan penegakan peraturan tentang pengendalian pencemaran tanah, air dan udara pada sektor industri dan komersial</p> <p>Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan meliputi persentase ketaatan atau kepatuhan terhadap aspek lingkungan</p> <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup</p>

Mengembangkan tata kelola limbah dan sampah (waste)

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan peran serta dalam pengendalian sampah

Penggalakkan penegakan peraturan yang berlaku

Memotivasi masyarakat dengan pemberian insentif (lomba kebersihan, dll.)

Mengembangkan sistem tata kelola sampah dari sumber menuju ke TPA

Pemilahan sampah bermanfaat dan penerapan pengelolaan berbasis 3R

Meningkatkan cakupan layanan kebersihan (lebih banyak bank sampah, peningkatan efisiensi sistem pengangkutan, dll.)

Kolaborasi dengan daerah sekitar untuk penanganan di daerah perbatasan

Meningkatkan sistem tata kelola *waste to energy* (biogas, sampah plastik menjadi aspal, dsb.)

Mengembangkan tata kelola energi (energy)

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab serta akan potensi energi alternatif terbarukan (bioenergi, pupuk cair, briket batubara muda)

Pengembangan sistem insentif bagi pihak yang memanfaatkan sumber energi alternatif

Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat

Optimalisasi proses energi alternatif yang sudah ada dengan bantuan teknologi

Strategi Pembangunan <i>Smart Governance</i>	Rincian kegiatan
Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi serta melakukan evaluasi kompetensi secara berkelanjutan	Sayogi Ngaladénan Masarakat : 100% aparatur Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki karakter melayani masyarakat dan kompeten dalam memanfaatkan teknologi informasi maupun sosial media
Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	Hiji Data Sumedang: Seluruh data dan informasi yang ditampilkan kepada masyarakat telah disampaikan secara terpusat dan memiliki data yang tersinkronisasi satu sama lain.
Meningkatkan efektivitas dan kinerja Lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian, pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Aplikasi Masyarakat Terintegrasi: Pemerintah Kabupaten memiliki 1 aplikasi khusus yang terintegrasi terkait informasi & laporan kegiatan, penilaian kinerja publik, Laporan masyarakat, dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat yang mencakup seluruh pelayanan publik. Data dan Informasi seluruh kinerja dapat diintegrasikan lintas SKPD maupun propinsi, dan pusat (Data Link)
Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan, pelayanan, layanan publik berbasis TIK sebagai basis pelayanan dasar dan rekomendasi/ evaluasi implementasi kebijakan	Volantis: Volantis adalah anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang menyediakan penyatuan data/data <i>unification platform</i> untuk transformasi digital, big data, & AI bagi bisnis dan institusi pemerintah.
Meningkatkan kedisiplinan aparatur, kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	
Strategi Pembangunan <i>Smart Branding</i>	Rincian kegiatan
Menciptakan <i>City Brand Identity</i> Sumedang yang unik dan melaksanakan <i>City Branding program</i> yang berjenjang dan berkesinambungan dalam meningkatkan perekonomian daerah	Sumedang Berkumandang: Festival yang diadakan di kawasan Cagar Budaya dengan dengan rangkaian acara festival parade budaya yang diikuti seluruh seniman lokal dan UMKM binaan, dan menggandeng BUMN dan Swasta yang, menyajikan panggung yang diisi kesenian asli Sumedang dengan tujuan untuk menghidupkan kawasan cagar budaya, merevitalisasi Kawasan cagar budaya untuk lebih ramah pengunjung. <i>Sumedang Art Festival</i> : Mengadakan lomba dan pagelaran kesenian tingkat Pelajar dan Mahasiswa

	<p><i>City Tour Culture</i>: Kegiatan keliling taman Sumedang dengan menggunakan bus yang terjadwal dan mempunyai rute <i>track</i> khusus.</p> <p>Kampung Lawas Sumedang: Kampung-kampung percontohan di Sumedang yang sarat dengan budaya lokal</p> <p>Sentra kerajinan: Pusat pengolahan produk olahan lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan warga sekitar, meningkatkan jumlah pengunjung wisata Sumedang, menumbuhkan ekonomi mikro, meningkatkan kreativitas warga sekitar.</p> <p>Peningkatan Wisata Oleh-oleh Sumedang: Sarana para wisata lokal dan internasional</p> <p>pariwisata dengan menampilkan berbagai wisata dengan memberikan oleh-oleh khas di Sumedang</p> <p>Peningkatan sarana pariwisata dengan menampilkan suasana wisata yang baru bagi keluarga dan edukasi untuk anak-anak di area satwa di Sumedang.</p>
<p>Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak yang bekerjasama</p>	<p>E-Kerjasama</p> <p>Aplikasi yang memberikan data dan tindak lanjut MoU antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pemerintah daerah lain atau instansi lain</p>
	<p>UMKM-Eksis Pemanfaatan Produk UMKM: Hasil atau produk-produk UMKM digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang</p>
<p>Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM dari pertanian, perikanan dan peternakan ( Misi 9)</p>	<p><b>PLATFORM SENTRA UMKM</b></p> <p>Portal dan aplikasi untuk penjualan produk UMKM untuk mempertemukan penawaran dan permintaan produk dan jasa di kabupaten Sumedang dan keluar wilayah Sentra UMKM: Sarana untuk display dan pemasaran produk pelaku usaha UMKM di tempat2 strategis seperti mall, tempat peristirahatan tol Cisumdawu</p>
	<p><b>MOTIFUANG</b></p> <p>Mobil Kreatif Sumedang: Kendaraan yang difungsikan sebagai toko berjalan untuk memasarkan dan mempromosikan Sentra Wisata Kuliner dan Produk UMKM kemasyarakat</p>
	<p><b>IPASAR</b></p> <p>Inovasi Pelayanan Fasilitas Pasar sesuai dengan Standar ISO 9001: memberikan pelayanan kepada konsumen melalui pemberian fasilitas yang memadai dan modernisasi Pasar-pasar Kabupaten Sumedang, misalnya pengembangan Sentra Kuliner khas Sumedang yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, penyediaan sarana parkir dan keamanan, ruangan tempat menyusui bagi pedagang dan pembeli, tempat penitipan anak, edukasi dan pelatihan layanan penyajian barang dagangan sesuai standar kepada setiap pedagang, memberikan sarana IPAL (Pengelolaan Air limbah), menyediakan sarana pengelolaan sampah</p>



	<p><b>SIMKUM</b> Sistem Informasi Manajemen Koperasi Usaha Mikro: Aplikasi berbasis web untuk memudahkan menyimpan dan mengelola data-data internal dari bidang bidang yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti data Koperasi, Usaha Mikro, Sentra Wisata Kuliner, Pasar dan lain-lain.</p>
	<p><b>SIMPETAN</b> Sistem Informasi Manajemen Pertanian: Aplikasi berbasis web untuk memudahkan menyimpan dan mengelola data-data internal dari bidang bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan seperti program pelatihan, tenaga penyuluh pertanian, informasi jenis tanaman pangan, data lahan dan kapasitas pertanian yang produktif dan tidak produktif, jenis tanaman pangan dan hortikultura yang ditanam, hasil produksi dan data musim, informasi cuaca terkait masa tanam, panen, informasi sumber pendanaan, dsb</p>
	<p><b>SIMPERNAK</b> Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Peternakan: Aplikasi berbasis web untuk memudahkan menyimpan dan mengelola data-data internal dari bidang bidang yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan seperti program pelatihan, tenaga penyuluh, data lahan perikanan dan perikanan yang produktif dan tidak produktif, jumlah, jenis ikan dan hewan ternak yang dipelihara dan potensi hasil ternak</p>
<p>Mengembangkan pusat-pusat diseminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif ( Misi 9)</p>	<p><b>RUTIMADANG</b> Rumah Kreatif Masyarakat Sumedang (Sumedang Creative Hub): Pusat kegiatan bagi warga kabupaten Sumedang yang melakukan usaha ekonomi kreatif melalui pendampingan, pelatihan keterampilan bisnis, branding, penjualan dan promosi (<i>online</i> dan <i>offline</i>) sekaligus bisa jadi paket wisata belanja.</p> <p><b>HUTAHU</b> Rumah Usaha Kulineran Kreatif Khas Sumedang (<i>Sumedang Culinary Hub</i>): Pusat usaha aneka kuliner makanan khas kreasi warga kabupaten Sumedang melalui pendampingan, pelatihan keterampilan bisnis, branding, penjualan dan promosi (<i>online</i> dan <i>offline</i>) sekaligus bisa jadi paket wisata belanja dengan <i>landmark</i> khas kota tahu.</p>

<p>Mengembangkan ekosistem industri pengolahan, pariwisata, edukasi dan jasa berdasarkan potensi wilayah</p>	<p>UNGGULMEDANG Program pengembangan Hub Industri Unggulan Sumedang berkaitan dengan potensi wilayah mulai dari industri pengolahan, pariwisata alam dan budaya, edukasi dan jasa</p>
<p>Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Misi 1)</p>	<p>PUJAMANIS Pekerja dan pengusaha semakin harmonis: pengusaha dan pekerja berkomunikasi dan mendapat pembinaan secara langsung, kunjungan dalam rangka <i>monitoring</i> dan pembinaan ke perusahaan</p>
<p>Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi (Misi 9)</p>	<p>PROINDANG Promosi Potensi Investasi Sumedang: <i>platform</i> berbasis digital memberikan informasi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sumedang melalui media elektronik disertai kajian penelitian yang menunjang data pendukung peluang ekonomi dan potensi investasi termasuk layanan informasi dan perijinan usaha satu pintu</p>
<p>Memperluas kesempatan kerja formal dan menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif (Misi 1)</p>	<p>WIRAMUDA Program pemberdayaan dengan sasaran anak muda putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi punya keinginan untuk meningkatkan akses ekonomi yang lebih baik dalam beragama usaha ekonomi kreatif.</p> <p>MEDANGFEST Lomba inovasi tahunan di bidang kepemudaan dalam menampilkan dan memamerkan hasil Produk Usaha Kreatif program WIRAMUDA secara berkala. Ditampilkan di kanal digital, Rumah dan Mobil Kreatif.</p>
<p>Memperluas kesempatan kerja formal dan menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif (Misi 1)</p>	<p>BUGADAYA: program pemberdayaan dengan sasaran ibu rumah tangga terutama dari keluarga miskin. Tujuan utamanya adalah menghidupkan mesin kedua dalam keluarga yaitu istri atau ibu rumah tangga, untuk meningkatkan perekonomian keluarga.</p> <p>DIFADAYA: program pemberdayaan khusus untuk warga difabel dengan keahlian tertentu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas.</p>
<p>Memperluas kesempatan kerja formal dan menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif (Misi 1)</p>	<p>SIPAJA (Sistem Informasi Pasar Kerja): Platform digital untuk pelatihan/persiapan calon tenaga kerja warga Sumedang, layanan informasi kesempatan kerja bagi pelaku usaha atau investor di kabupaten Sumedang dan untuk pendaftaran warga Sumedang yang ingin memasukkan lamaran kerja secara <i>online</i>.</p>
<p>Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (Misi 1)</p>	<p>PENTAS <i>Platform</i> Pelatihan Kompetensi Produktifitas untuk pendataan angkatan kerja dan program pelatihan di bidang tertentu</p>

<p>Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan (Misi 2)</p>	<p><b>PENTAS</b>          Platform Pelatihan Kompetensi Produktifitas untuk pendataan tenaga kerja dan masyarakat yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja</p> <p><b>INIEMAS</b>          Inkubasi Usaha Ekonomi Masyarakat: Program Fasilitas dan Pendampingan Usaha Mandiri yang difokuskan pada pembentukan mindset dan praktik keterampilan langsung agar masyarakat usia produktif dari keluarga pra-sejahtera mau melakukan usaha atau kegiatan produksi sesuai dengan sumber daya ekonomi yang tersedia</p> <p><b>MAHAMEDANG</b>          Program Mahasiswa Majukan Ekonomi Sumedang yaitu pendampingan usaha melalui kerjasama pendidikan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat untuk pengembangan produk usaha yang ada di masyarakat secara bertahap</p>
<p>Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan (Misi 2)</p>	<p><b>KAMPUANG</b>          Kampung Unggulan Sumedang: komunitas pelaku usaha yang menghasilkan satu jenis produk unggulan atau komoditas potensial dalam satu wilayah kampung/desa</p> <p><b>SAKUANG</b>          Pusat Inkubasi Usaha Mikro-Kecil Sumedang: Upaya pendataan pelaku UMKM, pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap para pemilik usaha mikro-kecil pengolahan komoditas potensial atau usaha tradisional di Kabupaten Sumedang, informasi dan bantuan perizinan usaha</p> <p><b>LOTIKUANG</b>  <i>Platform</i> untuk pencatatan dan pengawasan logistik di Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan data dan memetakan isi gudang di Kabupaten Sumedang untuk mendukung distribusi komoditas potensial</p>
<p>Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat less cash. (Hasil Bimbingan Teknis)</p>	<p>Pembayaran retribusi parkir berbasis Parkir Meter: Pembayaran retribusi parkir dilakukan melalui parkir meter dengan menggunakan uang elektronik. Retribusi parkir akan langsung masuk ke kas daerah (meminimalisir kebocoran) dan terekam di data transaksi bank (transparan dan <i>auditable</i>)</p> <p><b>TELUANG</b>          Program Transaksi Elektronik Sumedang: penggunaan sistem <i>rewardpunishment</i> (retribusi pajak PPN otomatis, pengurangan pajak, kemudahan ijin, dsb) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi <i>cashless</i>, pendampingan pengelolaan bantuan finansial untuk pelaku usaha, peningkatan kerjasama dengan penyedia <i>payment gateway</i> melalui transaksi elektronik dan percepatan usaha berbasis <i>cashless</i></p>

	<p><b>PELUANG</b> Platform penjualan hasil kegiatan usaha Sumedang adalah portal/aplikasi <i>e-Commerce</i> berbasis desa/wilayah untuk menampilkan produk-produk hasil usaha kreatif, UMKM atau komoditas potensial dari desa/kampung yang dapat dicari, diketahui dan bisa dilakukan transaksi penjualan oleh masyarakat Sumedang dan dapat diakses dari luar wilayah Sumedang</p>
<b>Strategi Pembangunan <i>Smart Living</i></b>	<b>Rincian Kegiatan</b>
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumedang berperilaku hidup sehat	<i>Smart IoT Healthcare (Antenatal Care)</i> : Pemeriksaan ibu kehamilan sejak tri semester awal dan <i>wearable IoT</i> USG untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil dan deteksi dini kehamilan beresiko tinggi
Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan.	Aplikasi e-Blanja melalui <i>platform e-Commerce</i> dengan Kios Digital yang tersebar
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas diseluruh wilayah Pemkab Sumedang	Memberikan sanksi denda dan sanksi hukum kepada pelanggar lalu lintas melalui pengamatan CCTV dan pelaksanaan sidang di tempat terdekat.
Mengembangkan transportasi massal khusus pelajar dan mahasiswa	Bis sekolah dengan teknologi <i>e-school card</i> : Mempermudah pelajar dan mahasiswa dalam mobilitas ke sekolah serta kampus dengan transportasi bis dan didukung dengan teknologi <i>e-school card</i>
Mewujudkan Sumedang Simpatik yang ramah anak, wanita, lansia, difabel dan berjiwa sosial.	POJOK CURCOL - Sumedang Simpatik: Penyediaan sarana konseling gratis di taman-taman di Sumedang untuk Mengurangi angka depresi dan stress warga Sumedang, menambah jumlah pengunjung taman.
	Pengembangan sistem SLRT berbasis Android dengan monitoring data yg <i>uptodate</i> tentang masyarakat miskin/ membutuhkan layanan dinas sosial Pemkab.
	Penyiapan Puskesmas terpadu sistem SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
	Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) dibangun di lokasi Wisata pilihan Pemkab. Mendukung Strategi Sumedang Pusat Budaya Sunda dan Sumedang Simpatik.
<b>Strategi Pembangunan <i>Smart Society</i></b>	<b>Rincian Kegiatan</b>
Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien ( <i>Community</i> )	Menyediakan kanal aspirasi/suara masyarakat didalam website <a href="https://www.sumedangkab.go.id/">https://www.sumedangkab.go.id/</a> sehingga konten website tidak hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemda namun juga menampilkan <i>dashboard</i> hasil koordinasi, <i>monitoring</i> , dan dokumentasi kegiatan yang dapat disampaikan kepada masyarakat

<p>Membangun ekosistem belajar yang efisien (<i>Learning</i>)</p>	<p>Ngariung Jalema : Forum interaksi antara jajaran pimpinan perangkat dinas daerah untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat umum (komunitas/kelompok yang tidak terafiliasi dengan lembaga politik/tidak memiliki kepentingan langsung dengan dinasny/kelompok yang teridentifikasi berseberangan pandangan) guna menyerap aspirasi berimbang. <i>Ngariung Jalema</i> bisa dijadikan sebagai wadah diskusi dan otokritik terkait wawasan dan karakter kebangsaan. Kegiatan ini diadakan di ruang terbuka hijau publik dengan suasana informal..</p> <p>Sumedang Sakola Digital : Program unggulan yang menargetkan seluruh sekolah (100%) tingkat paud, SD, dan SMP di Kabupaten Sumedang telah siap menjalankan pembelajaran dalam jaringan, dengan indikator setiap sekolah telah memiliki tenaga teknologi informasi dan sosial media yang berkompeten, dan mampu mengoperasikan website, sosial media populer secara mandiri.</p> <p>Ngariung Teknologi: <i>Event Hacking, Cracking, dan Coding</i> tahunan yang dapat dijadikan sebagai ajang mempertemukan talenta - talenta berbakat di bidang teknologi informasi sekaligus dapat membantu mengawasi kondisi jaringan teknologi informasi yang telah terbangun di Sumedang.</p> <p>Beasiswa <i>Sumedang Happy Digital Region</i> merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Digital yang unggul dan berdaya saing.</p>
<p>Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan masyarakat (<i>Security</i>)</p>	<p>Qlue merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dan digunakan pada <i>Jakarta Smart City</i> dalam bentuk sosial media yang mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan aplikasi ini, warga Jakarta dapat melaporkan aduan terhadap kondisi lingkungan seperti sampah, banjir, kemacetan, jalan rusak, kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, setiap laporan dapat dipantau progressnya untuk memastikan semua keluhan yang disampaikan ditindaklanjuti.</p>
<p><b>Strategi Pembangunan <i>Smart Environment</i> Rincian Kegiatan</b></p>	
<p>Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup (<i>Protection</i>)</p>	<p><i>Environment Monitoring System (EMS)</i> : Memonitor pencemaran air, tanah, dan udara secara <i>real time</i> yang bisa diakses pada <i>smart phone</i> di Kabupaten Sumedang salah satunya berisi indeks baku mutu untuk tanah, air, dan udara. Pada aplikasi disediakan layanan laporan pencemaran bagi masyarakat.</p> <p><i>Natural Water Monitoring System (NWMS)</i> : Sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi mata air yang penting di Kabupaten Sumedang, agar pengawasan bisa menjadi lebih mudah. Pada aplikasi disediakan layanan laporan kondisi mata air bagi masyarakat.</p>

	<p><i>Industrial and Commercial Sector Monitoring System (ICSMS)</i> : Aplikasi untuk memonitor kawasan industri dan komersial di Kabupaten Sumedang. Pada aplikasi disediakan layanan laporan untuk pencemaran dikawasan industri dan komersial bagi masyarakat.</p>
	<p><i>Green Area Application System (GAAS)</i> : Aplikasi atau Infografis dengan <i>Geographical Information System</i> yang digunakan untuk memonitor RTH Kabupaten Sumedang terkini</p>
	<p>Waduk Jatigede Information System (WJIS) : Laman web waduk Jatigede yang memuat informasi secara detail mengenai peta jalan akses menuju waduk hingga informasi mengenai keanekaragaman hayati bagi masyarakat umum</p>
<p>Mengembangkan Tata Kelola Limbah dan Sampah (Waste)</p>	<p><i>Sumedang Clean Information System (SCIS)</i> : Sistem informasi yang berbasis push message ke WA masyarakat Sumedang, yang berisi himbauan kebersihan di lingkungan masing-masing</p>
	<p><i>Sumedang TPA Information System (STIS)</i> : Aplikasi untuk memonitor sebaran TPA dan kapasitasnya secara real time, beserta jalurnya. Disedikan pula layanan untuk pengaduan bagi masyarakat yang langsung terhubung dengan tim pengelola sampah.</p>
	<p><i>Sumedang Renewable Energy (SRE)</i> : Sistem informasi yang menyediakan informasi detail kepada masyarakat tentang sumber energi terbarukan di Kabupaten Sumedang</p>
	<p><i>Sumedang Renewable Energy Master Plan (SREMP)</i> : Sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi rencana pengembangan sumber daya energi terbarukan di Kabupaten Sumedang</p>

### Lampiran III

## Kondisi Transformasi Digital Kabupaten Sumedang

### Sebelum Melakukan Transformasi



### Transformasi Saat Ini

### Transformasi di Masa Depan

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **rendah** dan tingkat kesejahteraan rakyat **belum optimal** (2018)

✓ Indeks SPBE : 2.48

✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 48.58

✓ Indeks Profesional ASN : 52

✓ Indeks Sistem Merit : 207

✓ Indeks Yanlink : -

✓ Indeks Daya Saing Daerah : Kurang inovatif

✓ Angka Kemiskinan : 9.76%

✓ Stunting : 32.20%

✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 70,99

✓ Indeks Gini : 0.42

✓ Desa Mandiri : 1 Desa

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **baik**, tapi tingkat kesejahteraan rakyat **terdisrupsi** (2022 & Hasil Evaluasi 2021)

✓ Indeks SPBE : 3,51 (2020 : 3,81)

✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 75,21

✓ Indeks Profesional ASN : 63,64

✓ Indeks Sistem Merit : 328,5

✓ Indeks Yanlink : 4,56 (A)

✓ Indeks Daya Saing Daerah : Sangat Inovatif

✓ Angka Kemiskinan : 10,71%

✓ Stunting : 17,5%

✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 71,80

✓ Indeks Gini : 0.35

✓ Desa Mandiri : 81 Desa

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **optimal** dan tingkat kesejahteraan rakyat **optimal** (2023)

✓ Indeks SPBE : 4

✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 80

✓ Indeks Profesional ASN : 70

✓ Indeks Sistem Merit : 360

✓ Indeks Yanlink : 4,80

✓ IDD : Terinovatif

✓ Angka Kemiskinan : 8.50%

✓ Stunting : 8% (BPB)

✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 74

✓ Indeks Gini : 0.34

✓ Desa Mandiri : 135 Desa